

Katalog: 9199011.51

TINJAUAN PEREKONOMIAN BALI 2021



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BALI



TINJAUAN PEREKONOMIAN BALI 2021



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BALI

TINJAUAN PEREKONOMIAN BALI 2021

ISSN : 2477-7587

Nomor Publikasi : 51000.2222

Katalog : 9199011.51

Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman : xiv + 80 halaman

Naskah : Bidang Nerwilis

Penyunting : Bidang Nerwilis

Disain Kover : Bidang Nerwilis

Diterbitkan Oleh : ©BPS Provinsi Bali

Gambar : Freepik.com dan Unsplash.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Tim Penyusun
Tinjauan Perekonomian Bali 2021

Penanggung Jawab Umum:

Hanif Yahya S.Si.,M.si

Penanggung Jawab Teknis:

Kadek Muriadi Wirawan SE, M.Si

Koordinator:

Ni Luh Putu Dewi Kusumawati, SST., MSi.

Anggota:

Ketut Ksama Putra, SST

Disain Kover:

Ketut Ksama Putra, SST.

KATA PENGANTAR

Belum meredanya pandemi Covid-19 di tahun 2021 membuat indikator-indikator perekonomian pada tahun tersebut masih belum menunjukkan arah menggembirakan. Apalagi Bali yang sebagai daerah pariwisata kembali mencatatkan laporan pertumbuhan terendah secara nasional. Tentunya data dan informasi menjadi berharga di kondisi saat ini dalam memberikan wawasan yang tepat untuk memahami situasi secara komprehensif dan merumuskan kebijakan lebih lanjut.

Publikasi “Tinjauan Perekonomian Bali 2021” merupakan publikasi yang membahas kondisi makro ekonomi dan sosial ke dalam tiga bagian. Bagian pertama tentang perkembangan ekonomi dan inflasi. Bagian kedua mengenai perdagangan luar negeri dan pariwisata. Sedangkan bagian terakhir membahas pembangunan sosial dan pembangunan manusia.

Akhir kata, publikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk siapa saja yang membacanya. Berbagai saran dan masukan sangat diharapkan demi perbaikan pada edisi yang akan datang. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi pada penyusunan publikasi ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Denpasar, Juni 2022
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Bali



Hanif Yahya S.Si.,M.Si

DAFTAR ISI

Bab	Subbab	Keterangan	Halaman
I		Perkembangan Ekonomi dan Inflasi	1
	I.1	Distribusi dan Pertumbuhan Ekonomi	1
	I.2	Perkembangan Inflasi dan IHK	26
II		Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata	31
	II.1	Perdagangan Luar Negeri	31
	II.2	Perkembangan Pariwisata	37
III		Pembangunan Sosial dan Pembangunan manusia	41
	III.1	Perkembangan Kondisi Kemiskinan	41
	III.2	Distribusi Pendapatan	46
	III.3	Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan	54
	III.4	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	61

DAFTAR TABEL

Subbab	No	Keterangan	Halaman
I.1	I.1	Kontribusi Lapangan Usaha pada PDRB Bali, 2019 -2021	7
	I.2	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha pada PDRB Bali, 2017-2021	11
	I.3	Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap Pertumbuhan PDRB Bali, 2016 -2020	14
	I.4	Indikator PDRB Provinsi Bali, 2017 -2021	17
	I.5	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Bali, 2017 -2021 (Miliar Rp)	19
	I.6	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Bali, 2017 -2021 (Miliar Rp)	20
	I.7	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Provinsi Bali, 2017 -2021 (Persen)	22
	I.8	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Bali, 2017 -2021 (Persen)	25
	I.9	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Bali, 2017 - 2021	26
	I.10	Laju Inflasi Singaraja dan Denpasar Menurut Kelompok Pengeluaran, 2021	30
II.1	II.1	Ekspor Bali Menurut Negara Tujuan, 2020 - 2021	33

	II.2	Ekspor Bali Menurut Komoditas Utama, 2021	34
	II.3	Impor Bali Menurut Negara Asal, 2021	35
	II.4	Impor Bali Menurut Komoditas, 2021	36
II.2	II.5	Kedatangan Wisman Langsung ke Bali Menurut Kebangsaan, Januari – Desember 2020	38
III.4	III.1	Indikator Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali, 2011-2021	64
	III.2	Perkembangan IPM Bali Menurut Kabupaten/Kota, 2019 - 2021	66
	III.3	Pertumbuhan IPM dan Komponennya Bali, 2019 - 2021	68
	III.4	Umur Harapan Hidup (UHH) Bali, 2011 - 2021	69
	III.5	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Bali Menurut Kabupaten/kota, 2019 – 2021	73
	III.6	Rata-rata Lama Sekolah/ <i>Mean Years of Schooling</i> (MYS) Bali Menurut Kabupaten/kota, 2019 – 2021	76
	III.7	Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan Menurut Kabupaten /kota, 2019 - 2021	78

DAFTAR GRAFIK

Subbab	No	Keterangan	Halaman
I.1	I.1	Kontribusi Lapangan Usaha Primer, Sekunder dan Tersier dalam PDRB Bali, 2017 - 2021	3
	I.2	Kontribusi PDRB Lapangan Usaha Pertanian dan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan Minum Terhadap PDRB Bali, 2017 - 2021 (Persen)	5
	I.3	Distribusi PDRB Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha, 2021 (Persen)	6
	I.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Bali dan Perbandingannya dengan Nasional, 2017 - 2021 (Persen)	8
	I.5	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha, 2021 (Persen)	9
	I.6	Rata – Rata Laju Pertumbuhan Riil PDRB Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha, 2017 - 2021 (Persen)	10
	I.7	Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha, 2021 (Persen)	12
	I.8	PDRB Per Kapita Provinsi Bali, 2017 – 2021 (juta rupiah)	16
	I.9	Perbandingan PDRB ADH Berlaku dan ADH Konstan 2010 Menurut	21

		Pengeluaran Provinsi Bali, 2017 – 2021 (Triliun Rupiah)	
I.2	I.10	Inflasi Singaraja, Denpasar dan Nasional, 2011 - 2021	28
	I.11	Inflasi Bulanan Singaraja, Denpasar dan Nasional, 2019 - 2021	28
II.1	II.1	Perkembangan Ekspor, Impor dan Net Ekspor Bali, 1990 - 2021	32
	II.2	Jumlah Kunjungan Wisman ke Bali dan Pertumbuhannya, 1969 - 2021	38
	II.3	Perkembangan TPK Hotel Bintang Menurut Bulan, 2019 - 2021	39
	II.4	Perkembangan Rata-rata Lama Menginap Hotel Bintang Menurut Bulan, 2019 - 2021	41
III.1	III.1	Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali, 2011 - 2021	43
	III.2	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali, 2011 - 2021	44
	III.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali, 2011 - 2021	45
	III.4	Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Bali, 2011 - 2021	46
	III.5	Koefisien Gini Bali dan Nasional, 2007 – 2021	49
	III.6	Koefisien Gini Kabupaten/Kota, 2017 – 2021	50
	III.7	Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Bali, 2021	51
	III.8	Distribusi Konsumsi Makanan Kabupaten/Kota di Bali, 2020 –	52

		2021 Beserta Konsumsi Per Kapitanya	
	III.9	Konsumsi Makanan dan Non Makanan pada Golongan Pengeluaran, 2020 – 2021	53
III.3	III.10	UMP Kabupaten/Kota dan Provinsi Bali, 2020 – 2021	56
	III.11	Tingkat Pengangguran Terbuka Bali, Nasional dan Beberapa Provinsi, 2001 - 2021	57
	III.12	TPAK Bali Bulan Agustus dan Februari, 2012 - 2021	59
	III.13	Proporsi Angkatan Kerja Menurut Kelompok Usia, 2021	60
	III.14	Proporsi Angkatan Kerja Menurut Sektor, 2021	61
III.4	III.15	Perkembangan IPM Bali, 2011 - 2021	63
	III.16	Pertumbuhan IPM dan Ekonomi Bali, 2011 - 2021	65
	III.17	Pergerakan Status Capaian IPM Bali, 2010 - 2021	67
	III.18	Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota dan Pertumbuhannya, 2021	70
	III.19	Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Bali, 2011 – 2021	72
	III.20	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Bali dan Kenaikannya, 2021	74

III.21	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Provinsi Bali, 2010 - 2021 (Rp 000)	77
III.22	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten/Kota dan Pertumbuhannya, 2021	77
III.23	IPM Beberapa Provinsi di wilayah JABALNUSRA, 2021	79

<https://bali.bps.go.id>

BAB I

Perkembangan Ekonomi dan Inflasi

I.1 Distribusi dan Pertumbuhan Ekonomi

Sampai akhir Desember 2021, pandemi Covid-19 masih belum mereda. Bahkan virus corona yang menjadi penyebab pandemi masih terus bermutasi. Beberapa varian yang terkenal dan heboh di Indonesia pada tahun 2021 adalah varian Delta dan varian Omicron. Varian-varian tersebut bahkan memiliki daya penularan yang lebih tinggi dari jenis sebelumnya. Tentunya kejadian ini membuat protokol kesehatan seperti anjuran *physical distancing*, atau pembatasan jarak fisik antara satu dengan yang lainnya kembali diperketat. Dengan demikian, mobilitas penduduk dalam skala besar jauh berkurang. Otomatis, kegiatan produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya di kinerja perekonomian juga turut terdampak parah.

Pemerintah Indonesia sendiri telah berupaya menanggulangi dampak parah pandemi Covid-19 seperti melakukan kebijakan percepatan program vaksinasi di tahun 2021 serta Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN). Secara nasional, perekonomian Nasional memberi sinyalemen pemulihan dengan memberikan catatan kinerja perekonomian 2021 yang rebound cukup kuat yakni tumbuh positif sebesar 3,69 persen. Meskipun demikian, sektor-sektor jasa masih jauh terkendala akibat kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang kembali diperkuat serta aturan kewajiban tes PCR bagi pelaku transportasi. Sebagai daerah yang

sangat bergantung pada kinerja sektor jasa dalam perekonomiannya, Bali belum dapat bangkit dari keterpurukan. Hal tersebut tercermin dari kontraksi perekonomian yang masih terjadi.

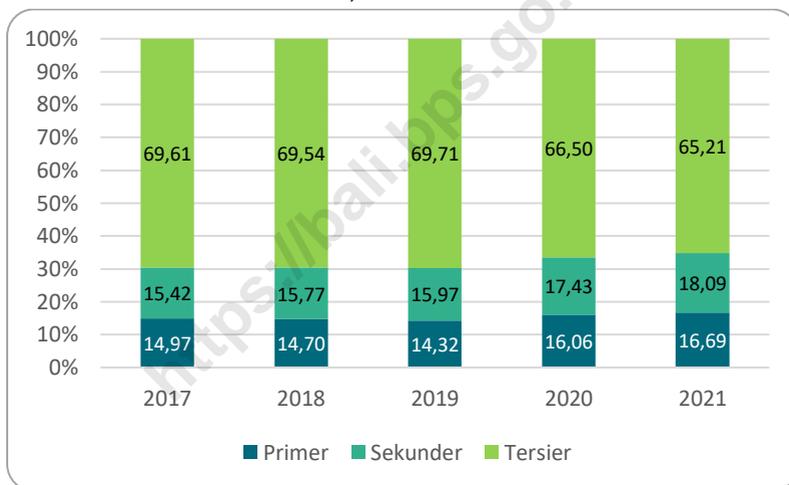
Secara umum, perekonomian Provinsi Bali diukur berdasarkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan hasil estimasi total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan ekonomi yang terjadi. Dalam mencerminkan besaran absolut perekonomian pada periode waktu tertentu, PDRB disajikan atas harga berlaku. Sedangkan untuk mengukur pertumbuhan perekonomian dari waktu ke waktu, PDRB disajikan atas harga konstan. Pada tahun 2021, Perekonomian Bali atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp.219,80 triliun, sementara atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp.143,87 triliun. Besaran perekonomian Bali tersebut memberi sumbangan 1,30 persen terhadap perekonomian Nasional.

Berdasarkan kategori lapangan usaha, peranan sektor tersier terhadap perekonomian Bali masih tercatat mendominasi dibandingkan dengan dua sektor lainnya (primer dan sekunder). Pada tahun 2021, sektor tersier memberikan *share* sebesar 65,21 persen. Sementara sektor sekunder dan primer masing-masing sebesar 18,09 persen dan 16,69 persen. Dominasi sektor tersier juga terlihat selama lima tahun terakhir, kontribusinya mencapai dua kali lipat lebih dari total kontribusi sektor lainnya. Namun pada dua tahun terakhir (2019-2021), kontribusi sektor tersier yang pada tahun-tahun sebelumnya cenderung meningkat, sekarang mengalami perubahan arah. Adanya wabah pandemi Covid-19

yang memukul berat aktivitas perekonomian jasa-jasa membuat kontribusi sektor tersier menurun dari 69,71 persen menjadi 65,21 persen. Bahkan besaran kontribusi pada tahun 2021 juga tercatat lebih kecil dibanding kondisi saat lima tahun sebelumnya (tahun 2017) yang kala itu tercatat sebesar 69,61 persen.

Grafik I.1

Kontribusi Lapangan Usaha Primer, Sekunder dan Tersier dalam PDRB Bali, 2017 – 2021



Selama lima tahun terakhir, kondisi sektor sekunder cenderung selalu mengalami peningkatan. Secara rata-rata, tercatat penambahan setiap tahunnya sebesar 0,67 poin. Penambahan tertinggi terjadi dari tahun 2019 ke 2020, yakni sebesar 1,46 poin. Kondisi tersebut sejalan dengan fenomena Covid-19 di tahun 2020 yang memberi dampak negatif luar biasa terhadap sektor jasa, sehingga sebagian besar masyarakat beralih ke sektor sekunder atau primer.

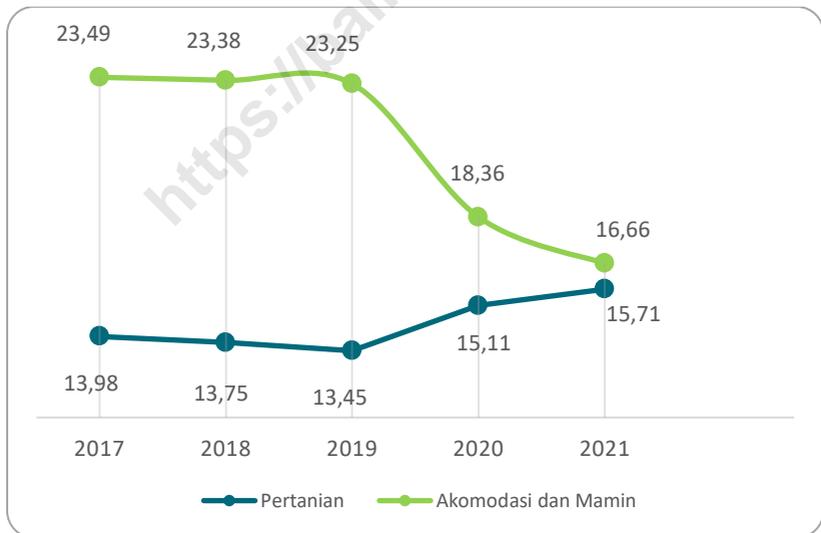
Sejalan dengan kondisi sebelumnya, penurunan sektor tersier yang terjadi di tahun ini mengakibatkan kontribusi sektor primer pada tahun 2021 memiliki ruang untuk mengembang. Setelah selama tahun 2017-2019 kontribusi sektor primer selalu menurun, akhirnya di tahun 2019-2020 mengalami peningkatan sebesar 1,74 poin dan tahun 2020-2021 meningkat 0,63 poin. Hal ini diduga dari perubahan kelesuan mata pencaharian di sektor pariwisata yang lebih bersifat formal menuju pekerjaan yang cenderung informal di sektor primer. Meski sebagian besar kontribusi sektor perekonomian mengalami pergolakan, namun penjabaran secara lebih rinci per lapangan usaha selama periode tahun 2017 – 2021 masih menunjukkan struktur perekonomian Bali yang tidak banyak mengalami perubahan.

Lapangan usaha yang memiliki *share* paling besar terhadap perekonomian Bali adalah lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum. Meski indikator-indikator kepariwisataan menunjukkan hasil yang tidak menggembirakan pada tahun ini, seperti jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang turun hampir -100,00 persen serta Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang yang turut turun -16,18 poin (dari 28,71 persen ke 12,53 persen). Kategori penyediaan akomodasi dan makan minum masih memegang dominasi perekonomian Provinsi Bali di tahun 2021, dengan catatan besaran kontribusi mencapai 16,66 persen.

Hal sebaliknya terjadi pada lapangan usaha yang memberi kontribusi terbesar kedua yaitu lapangan usaha pertanian. Pada tahun 2021, kontribusi lapangan usaha pertanian tercatat sebesar 15,71 persen. Mengalami peningkatan 0,60 poin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, peningkatan tersebut merupakan kenaikan kedua berturut-turut setelah tahun-tahun sebelumnya *share* kategori pertanian tercatat selalu mengalami penurunan.

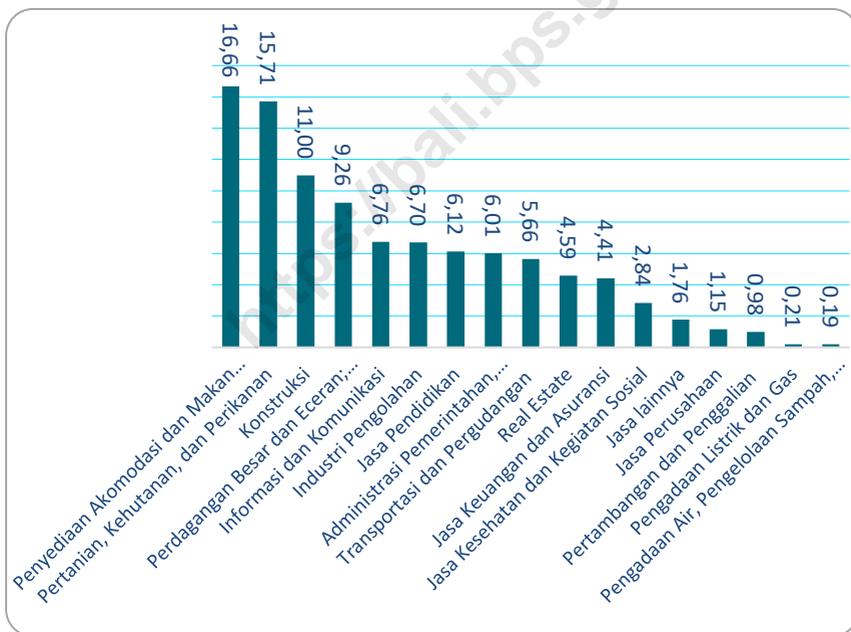
Grafik I.2

Kontribusi PDRB Lapangan Usaha Pertanian dan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan Minum Terhadap PDRB Bali, 2017 – 2021 (Persen)



Lapangan usaha terbesar ketiga penyumbang perekonomian Bali adalah lapangan usaha konstruksi. Sumbangan lapangan usaha tersebut tercatat sebesar 11,00 persen pada tahun 2021. Sementara itu, tiga kategori dengan kontribusi paling kecil di tahun ini adalah pertambangan dan penggalian (0,98 persen); pengadaan listrik dan gas (0,21 persen); serta pengadaan air dan pengelolaan sampah (0,19 persen).

Grabfik I.3
Distribusi PDRB Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha,
2021 (Persen)



Tabel I.1
Kontribusi Lapangan Usaha pada PDRB Bali, 2019 -2021

Lapangan Usaha		2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,45	15,11	15,71
B	Pertambangan dan Penggalian	0,87	0,95	0,98
C	Industri Pengolahan	6,04	6,44	6,70
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,23	0,22	0,21
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah DLL	0,17	0,19	0,19
F	Konstruksi	9,53	10,58	11,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	8,57	9,05	9,26
H	Transportasi dan Pergudangan	9,79	6,96	5,66
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	23,25	18,36	16,66
J	Informasi dan Komunikasi	5,31	6,37	6,76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,99	4,26	4,41
L	Real Estat	3,89	4,43	4,59
M,N	Jasa Perusahaan	1,04	1,15	1,15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	4,93	5,69	6,01
P	Jasa Pendidikan	5,15	5,89	6,12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,18	2,58	2,84
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,62	1,75	1,76
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00

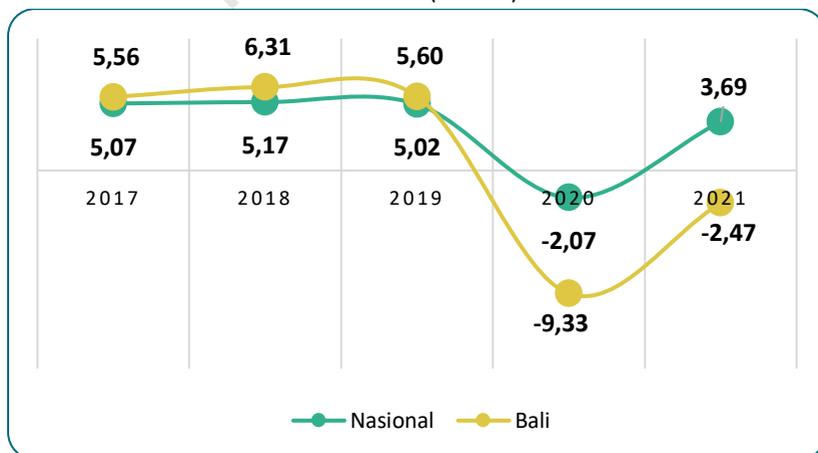
* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Jika sebelumnya dibahas mengenai *share* atau biasa disebut kontribusi ekonomi, berikutnya adalah mengenai laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dalam hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan produksi yang terjadi di suatu daerah atau wilayah. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Bali tercatat minus atau kontraksi sedalam -2,47 persen. Angka ini mengalami pendangkalan nilai pertumbuhan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat tumbuh -9,33 persen. Pertumbuhan perekonomian Bali tercatat lebih rendah dan berbeda arah dari angka nasional yang tercatat tumbuh positif 3,69 persen. Bahkan jika pertumbuhan Bali disandingkan dengan provinsi lainnya, pertumbuhan di tahun 2021 ini tercatat sebagai yang terendah secara nasional.

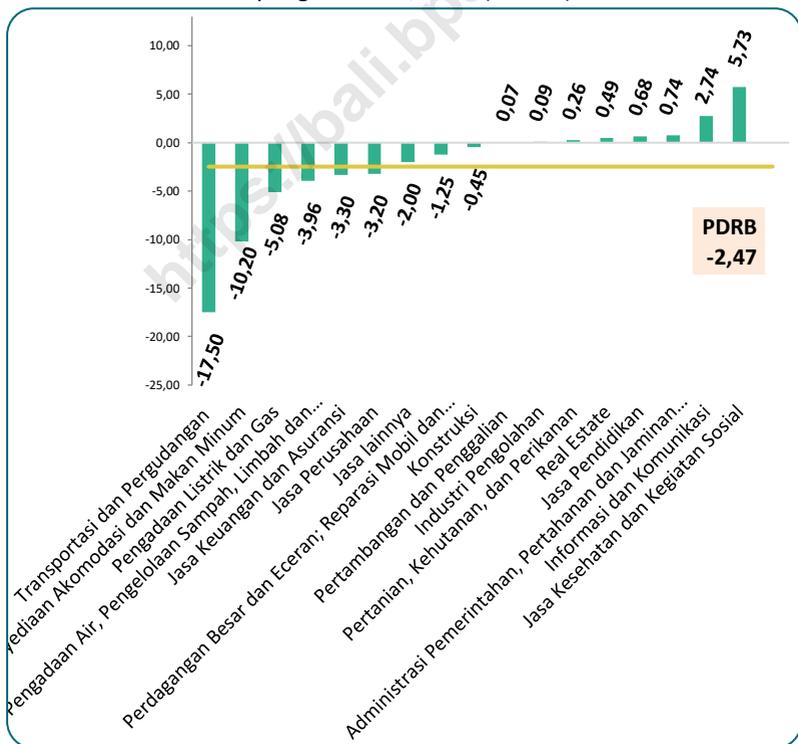
Grafik 1.4

Laju Pertumbuhan Ekonomi Bali dan Perbandingannya dengan Nasional, 2017 – 2021 (Persen)



Dilihat lebih rinci pada pertumbuhan per lapangan usaha, lapangan usaha transportasi dan pergudangan memiliki pertumbuhan terendah pada tahun 2021, yakni sedalam -17,50 persen. Pertumbuhan terendah kedua tercatat pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum dengan laju pertumbuhan sedalam -10,20 persen, disusul oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas yang tercatat tumbuh -5,08 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada **Grafik I.5**.

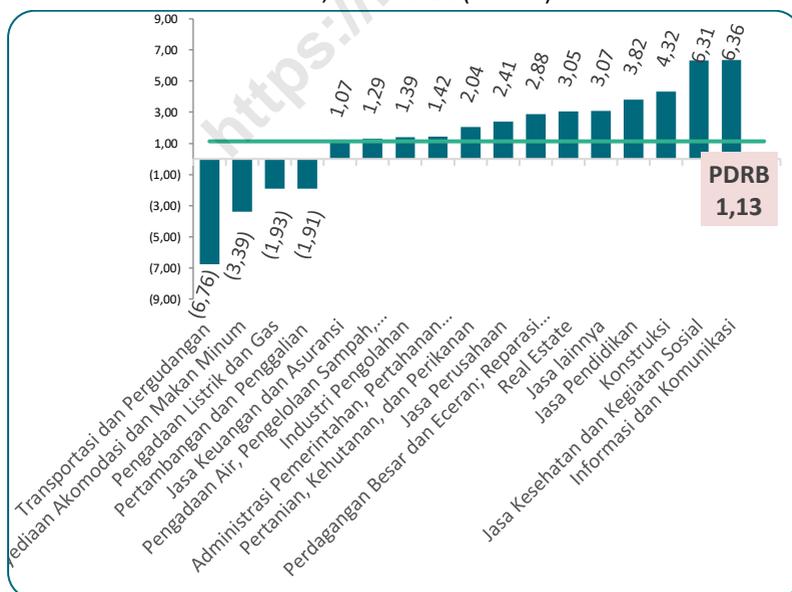
Grafik I.5
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha, 2021 (Persen)



Jika dilihat secara rata-rata, maka rata-rata pertumbuhan terendah per tahun dalam kurun waktu 2017-2021 tercatat pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan, dengan pertumbuhan sedalam -6,79 persen. Rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah kedua diduduki oleh penyediaan akomodasi dan makan minum yang tercatat tumbuh sedalam -3,39 persen. Pengadaan listrik dan gas tercatat sebagai lapangan usaha dengan rata-rata pertumbuhan terendah selanjutnya, yakni -1,93 persen. Sementara itu, informasi dan komunikasi menjadi rata-rata pertumbuhan tertinggi di periode waktu lima tahun terakhir ini, yaitu sebesar 6,36 persen.

Grafik I.6

Rata – Rata Laju Pertumbuhan Riil PDRB Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha, 2017–2021 (Persen)



Tabel I.2

Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha pada PDRB Bali, 2017-2021

	Lapangan Usaha	2017	2018	20189	2020*	2021**	Rata-rata
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,73	4,73	3,46	-0,98	0,26	2,04
B	Pertambangan dan Penggalian	-1,44	-2,65	-1,23	-4,28	0,07	-1,91
C	Industri Pengolahan	0,80	5,69	6,79	-6,44	0,09	1,39
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,48	1,94	4,52	-16,49	-5,08	-1,93
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,72	2,03	6,17	-0,51	-3,96	1,29
F	Konstruksi	7,87	9,76	6,87	-2,42	-0,45	4,32
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,84	7,52	7,35	-7,05	-1,25	2,88
H	Transportasi dan Pergudangan	5,00	6,13	4,63	-32,06	-17,50	-6,76
I	Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	9,03	6,70	5,03	-27,50	-10,20	-3,39
J	Informasi dan Komunikasi	8,10	7,74	7,06	6,16	2,74	6,36
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,43	1,93	8,78	-4,48	-3,30	1,07
L	Real Estat	4,34	4,07	5,87	0,48	0,49	3,05
M,N	Jasa Perusahaan Administrasi	6,91	7,79	4,61	-4,08	-3,20	2,41
O	Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,60	4,19	4,50	-0,73	0,74	1,42
P	Jasa Pendidikan	7,00	7,38	4,86	-0,83	0,68	3,82
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,44	8,59	5,97	2,84	5,73	6,31
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,85	8,37	7,61	-6,45	-2,00	3,07
Produk Domestik Regional Bruto		5,56	6,31	5,60	-9,33	-2,47	1,13

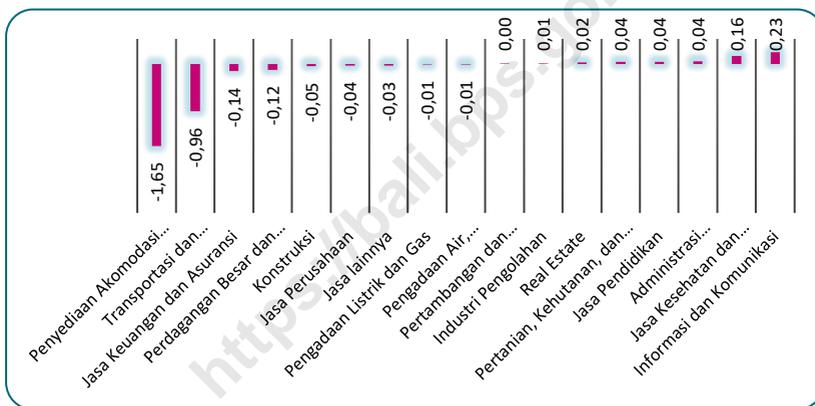
* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat peranan suatu lapangan usaha terhadap total perekonomian Bali adalah Sumber Pertumbuhan (*Source of Growth*). Dengan menghitung sumber pertumbuhan ekonomi dapat dilihat peranan suatu lapangan usaha terhadap pertumbuhan yang dicapai suatu wilayah.

Grafik I.7

Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha, 2021 (Persen)



Pada **Grafik I.7** dapat dilihat peranan seluruh lapangan usaha terhadap pertumbuhan PDRB Bali. Pada tahun 2021, penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi sumber pertumbuhan utama yakni sebesar -1,65 persen. Diikuti lapangan usaha transportasi dan perdagangan serta lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi pada urutan selanjutnya dengan sumbangan masing-masing sebesar -0,96 persen dan -0,14 persen. Sementara itu, lapangan usaha informasi dan komunikasi menjadi lapangan usaha dengan sumber pertumbuhan positif

terbesar di tahun 2021, yakni mencapai 0,23 persen. Kebijakan *work from home* serta *school from home* sekiranya menjadi pemicu penggerak nilai tambah di kategori lapangan usaha ini untuk mengalami peningkatan. Selain itu, anjuran pemerintah untuk lebih memilih berdiam diri di rumah diduga juga turut meningkatkan aktivitas pemakaian *gadget* di tahun 2021.

Dalam kurun waktu tahun 2017-2021, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum secara rata-rata memberikan sumbangan tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. Hal ini menunjukkan bahwa lapangan usaha tersebut merupakan lapangan usaha yang paling dominan.

Sebagai lapangan usaha dengan sumbangan kontribusi tertinggi kedua pada tahun 2020, besaran sumbangan lapangan usaha transportasi dan pergudangan terhadap perekonomian mengalami tren penurunan selama lima tahun terakhir. Kondisi yang sejalan juga terlihat dari lapangan usaha perdagangan. Dalam periode yang sama (2017-2021), perkembangan kontribusi lapangan usaha ini relatif menurun. Sementara itu, lapangan usaha informasi dan komunikasi, real estat, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial menjadi tiga lapangan usaha yang selalu memberi sumber pertumbuhan positif terhadap perekonomian Bali selama lima tahun terakhir. Selengkapny dapat dilihat pada **Tabel I.3**.

Tabel I.3
Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha,
2017 - 2021

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,38	0,65	0,47	-0,13	0,04
B	Pertambangan dan Penggalian	-0,02	-0,03	-0,01	-0,04	0,00
C	Industri Pengolahan	0,05	0,36	0,43	-0,41	0,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,00	0,01	-0,03	-0,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,00	0,01	0,00	-0,01
F	Konstruksi	0,74	0,94	0,68	-0,24	-0,05
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,70	0,69	0,68	-0,66	-0,12
H	Transportasi dan Pergudangan	0,37	0,45	0,34	-2,34	-0,96
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,77	1,36	1,03	-5,57	-1,65
J	Informasi dan Komunikasi	0,55	0,54	0,50	0,44	0,23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,11	0,08	0,35	-0,19	-0,14
L	Real Estat	0,21	0,19	0,27	0,02	0,02
M,N	Jasa Perusahaan	0,08	0,09	0,05	-0,05	-0,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,10	0,24	0,25	-0,04	0,04
P	Jasa Pendidikan	0,38	0,41	0,27	-0,05	0,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,19	0,20	0,14	0,07	0,16
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,12	0,14	0,13	-0,11	-0,03
Produk Domestik Regional Bruto		5,56	6,31	5,60	-9,33	-2,47

* Angka sementara

** Angka sementara

Jika nilai PDRB Bali dibagi dengan jumlah penduduk Bali, maka tergambar tentang seberapa besar nilai tambah yang diciptakan atau diterima tiap-tiap penduduk, sehingga secara tidak langsung akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di daerah atau wilayah bersangkutan. Indikator ini disebut dengan PDRB per kapita.

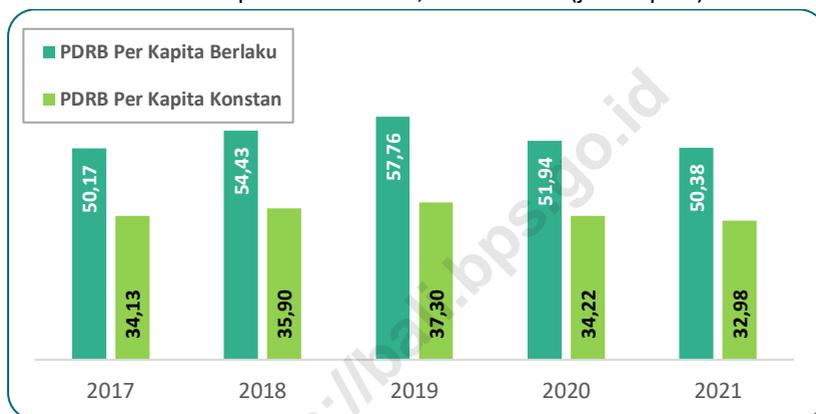
Semakin besar nilai PDRB per kapita, maka dapat dikatakan suatu daerah atau wilayah makin sejahtera. Kendati demikian, perlu diingat bahwa PDRB per kapita merupakan angka agregat (rata-rata) sehingga masih sangat kasar jika dijadikan cerminan bagi tingkat kesejahteraan penduduk. Angka ini mengasumsikan semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap pendapatan. Dengan kata lain, nilai PDRB per kapita ini belum mampu menggambarkan tingkat pemerataan distribusi pendapatan yang diterima penduduk di suatu daerah atau wilayah bersangkutan. Namun secara umum, data ini tetap berguna setidaknya untuk melihat perbandingan antar daerah atau wilayah maupun antar tahun.

PDRB per kapita Bali atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp.50,38 juta. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata setiap penduduk di Bali mampu menciptakan nilai tambah sebesar Rp.50,38 juta selama tahun 2021. Jumlah ini menurun sebanyak Rp1,56 juta jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika dilihat berdasarkan harga konstan, maka PDRB per kapita Bali yang terbentuk pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp32,98 juta. Nilai ini menurun sebanyak Rp1,24 juta atau tumbuh menurun -3,62 persen. Artinya, dengan

mengesampingkan faktor inflasi harga yang terjadi selama setahun terakhir, nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap penduduk Bali secara rata-rata menurun sedalam -3,62 persen.

Grafik I.8

PDRB Per Kapita Provinsi Bali, 2017 – 2021 (juta rupiah)



PDRB per kapita dapat pula digunakan sebagai acuan untuk menilai apakah hasil pembangunan yang dilakukan selama ini secara umum telah dapat meningkatkan “kue perekonomian” secara makro. Dengan kata lain, dapat dilihat bagaimana penciptaan nilai tambah yang terjadi akibat proses pembangunan bila dibandingkan dengan peningkatan jumlah penduduk di Bali. Nilai PDRB per kapita Bali yang meningkat menunjukkan bahwa hasil pembangunan yang telah dilakukan di Bali mampu menciptakan peningkatan nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan jumlah penduduk Bali.

Tabel I.4
Indikator PDRB Provinsi Bali, 2017 - 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020*	2021**
1	PDRB Harga Berlaku (Milyar Rp)	213.035,9	233.636,8	251.934,1	223.900,9	219.800,0
2	PDRB Harga Konstan (Milyar Rp)	144.933,3	154.072,7	162.693,4	147.521,4	143.840,4
3	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (000 Org)	4.246,5	4.292,2	4.362,05	4.310,75	4.362,74
4	PDRB Per Kapita Harga Berlaku (Juta Rp)	50,17	54,43	57,76	51,94	50,38
5	PDRB Per Kapita Harga Konstan (Juta Rp)	34,13	35,90	37,30	34,22	32,98

Keterangan:

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Jika pada bagian sebelumnya uraian disampaikan menggunakan kerangka pengukuran PDRB menurut kategori lapangan usaha, maka selanjutnya akan diuraikan melalui sisi pandang konsumsi atau penggunaannya. Sebelumnya PDRB dilihat dari sisi “dari mana volume ekonomi dihasilkan”, maka selanjutnya PDRB akan dilihat dari arah “untuk apa saja volume ekonomi tersebut digunakan”. Dilihat dari sisi penggunaan, perubahan struktur ekonomi Bali tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh

perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan atau penurunan perdagangan internasional.

Data menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Bali digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPR, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

Selama lima tahun terakhir, kondisi perekonomian Bali yang sebelumnya stabil dengan peningkatan nilai tambah yang terjadi akhirnya mengalami kontraksi atau tumbuh negatif di tahun 2021. Wabah pandemi Covid-19 tidak hanya menyerang segi kesehatan namun turut memukul sendi-sendi perekonomian. Dari sisi pengeluaran, penurunan perekonomian yang terjadi diakibatkan oleh adanya perubahan harga maupun perubahan volume. Baik PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Harga Konstan (ADHK) sama-sama menunjukkan penurunan.

Meski harga masih terjaga dengan masih tercatatnya perkembangan harga yang menunjukkan inflasi (secara umum harga meningkat) baik di Kota Denpasar (2,01 persen) dan Kota Singaraja (2,39 persen), nyatanya nilai PDRB ADHB tahun 2021 Bali masih tercatat kalah dengan tahun 2020. Pada tahun 2021, besaran PDRB ADHB tercatat 219,80 triliun rupiah, atau lebih rendah -1,83 persen dibanding tahun

sebelumnya yang tercatat 223,90 triliun rupiah. Dengan demikian, perubahan harga yang mengalami peningkatan selama setahun terakhir ternyata belum mampu menarik besaran absolut perekonomian akibat perubahan volume yang jauh menurun.

Tabel I.5
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Bali,
2017-2021 (Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
1. Konsumsi Rumah Tangga	102.152,93	111.762,44	121.140,03	119.957,69	122.107,15
2. Konsumsi LNPRT	2.580,41	2.764,03	3.163,69	3.055,82	3.185,25
3. Konsumsi Pemerintah	22.603,58	24.531,44	26.712,14	28.009,44	27.384,26
4. PMTB	63.293,06	71.936,11	74.886,65	67.493,63	67.166,54
5. Perubahan Inventori	651,03	691,27	589,96	455,78	511,16
6. Ekspor Luar Negeri	86.638,51	96.781,56	97.203,75	24.638,56	6.923,22
7. Impor Luar Negeri	20.777,90	26.079,89	22.692,69	4.760,81	854,44
8. Net Ekspor Antar Daerah	-44.105,77	-48.750,19	-49.069,43	-14.949,21	-6.623,13
PDRB	213.035,86	233.636,77	251.934,10	223.900,89	219.800,03

Keterangan:

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel I.6
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran
Provinsi Bali, 2017 - 2021 (Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
1. Konsumsi Rumah Tangga	76.190,69	80.025,34	84.688,99	81.601,58	81.726,57
2. Konsumsi LNPRT	1.746,82	1.864,02	2.082,68	2.000,72	2.060,65
3. Konsumsi Pemerintah	14.335,26	15.131,40	16.438,66	16.453,63	16.197,94
4. PMTB	46.623,27	51.076,08	52.755,13	46.598,91	44.547,84
5. Perubahan Inventori	239,28	246,51	229,51	210,49	268,98
6. Ekspor Luar Negeri	56.024,96	59.447,66	59.187,15	14.009,21	4.114,25
7. Impor Luar Negeri	13.317,18	16.568,49	14.315,44	3.111,96	543,17
8. Net Ekspor Antar Daerah	-36.909,78	-37.149,86	-38.373,32	-10.241,16	-4.502,66
PDRB	144.933,31	154.072,66	162.693,36	147.521,41	143.870,40

Keterangan:

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Untuk melihat perubahan PDRB secara kuantitas atau melihat perubahan volumenya, maka PDRB juga dinilai atas dasar harga konstan tahun 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan ini maka faktor pengaruh perubahan harga dapat dihilangkan, sehingga diperoleh gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja.

Grafik I.9

Perbandingan PDRB *adh Berlaku* dan *adh Konstan* 2010 Menurut
Pengeluaran Provinsi Bali, 2017 – 2021 (Triliun Rupiah)



Keterangan:

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

PDRB komponen pengeluaran ADHK atau PDRB riil menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara nyata, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Seperti halnya PDRB secara nominal, PDRB secara riil di Bali juga mengalami peningkatan berturut-turut selama tahun 2017-2019 dan mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2021 akibat dampak wabah pandemi Covid-19.

TABEL I.7
Distribusi PDRB ADHB
Menurut Pengeluaran Provinsi Bali, 2017 - 2021 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
1. Konsumsi Rumah Tangga	47,95	47,84	48,08	53,58	55,55
2. Konsumsi LNPRT	1,21	1,18	1,26	1,36	1,45
3. Konsumsi Pemerintah	10,61	10,50	10,60	12,51	12,46
4. PMTB	29,71	30,79	29,72	30,14	30,56
5. Perubahan Inventori	0,31	0,30	0,23	0,20	0,23
6. Ekspor	40,67	41,42	38,58	11,00	3,15
7. Impor	9,75	11,16	9,01	2,13	0,39
8. Net Ekspor Antar Daerah	-20,70	-20,87	-19,48	-6,68	-3,01
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan:

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB menurut pengeluaran, terdiri dari beberapa komponen pengeluaran. Komponen-komponen tersebut antara lain: konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir lembaga non profit (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor. Semua komponen tersebut, memiliki kontribusi untuk membentuk total PDRB pengeluaran.

Pada **tabel I.7** di atas, dapat dilihat bahwa komponen konsumsi rumah tangga merupakan komponen penyumbang PDRB terbesar (setengah lebih dari total PDRB). Hal ini menandakan bahwa sebagian besar produk (barang dan jasa) di Provinsi Bali masih digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga. Kontribusi komponen konsumsi

rumah tangga selama lima tahun terakhir berkisar antara 47,84 persen hingga 55,55 persen.

Kontribusi terbesar selanjutnya dan tergolong stabil selama lima tahun terakhir adalah komponen pengeluaran untuk kapital (PMTB). Komponen ini memberikan *share* terhadap perekonomian Bali pada kisaran 30 persen. Meski situasi tahun 2021 masih diliputi badai pandemi Covid-19, nampaknya pembangunan infrastruktur masih terus berjalan. Beberapa proyek besar yang terjadi di tahun 2021 di antaranya pembangunan jalan *Short Cut* Singaraja-Mengwitani, normalisasi aliran Tukad Unda Klungkung, pembangunan Bendungan Sidan di Kabupaten Buleleng, serta pembangunan pelabuhan Segitiga Sanur-Nusa penidana-Nusa ceningan.

Sementara itu, komponen konsumsi pemerintah memiliki kontribusi di kisaran 10 persen. Perkembangan kontribusi komponen tersebut juga relatif stagnan selama lima tahun terakhir. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran investasi dan peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidaklah terlalu besar hingga bisa mengubah struktur kontribusi PDRB menurut pengeluaran.

Perubahan yang menarik selama lima tahun terakhir adalah perkembangan kontribusi ekspor yang tercatat mengalami penurunan drastis. Pada tahun 2017, kontribusi ekspor tercatat sebesar 40,67 persen. Sementara di tahun 2021 hanya sebesar 3,15 persen. Dengan demikian, kontribusi ekspor mengalami penurunan cukup dalam hingga -37,52 poin dari tahun 2017 ke tahun 2021. Pembatasan ketat kegiatan

distribusi di sektor perdagangan serta menurun tajamnya wisman yang datang ke Bali akibat pandemi Covid-19 membuat ekspor barang maupun jasa menurun jauh di tahun 2021.

Di sisi lain, Provinsi Bali juga melakukan impor guna memenuhi permintaan domestik. Pada tahun 2017 sampai 2019, besaran permintaan domestik yang dipenuhi dari impor berada pada kisaran 10 persen. Sejalan dengan ekspor yang menurun di dua tahun terakhir, kontribusi impor di tahun 2021 ini juga tercatat menurun hingga 0,39 persen. Sementara itu, perbandingan impor dengan ekspor juga menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir nilai ekspor selalu lebih tinggi dari nilai impor, atau dengan kata lain, neraca perdagangan luar negeri Bali selalu menunjukkan posisi “surplus”.

Selain komponen-komponen tersebut, komponen pengeluaran untuk kapital (PMTB), juga memiliki kontribusi yang cukup besar, yaitu berada di kisaran 30 persen. Sedangkan komponen konsumsi pemerintah memiliki kontribusi di kisaran 10 persen. Perkembangan kontribusi kedua komponen tersebut relatif stagnan selama lima tahun terakhir. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran investasi dan peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidaklah terlalu besar hingga bisa mengubah struktur kontribusi PDRB menurut pengeluaran.

Tabel I.8
Pertumbuhan PDRB ADHK 2010
Menurut Pengeluaran Provinsi Bali, 2017 - 2021 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,04	5,03	5,83	-3,65	0,15
2. Konsumsi LNPRT	3,94	6,71	11,73	-3,94	3,00
3. Konsumsi Pemerintah	4,2	5,55	8,64	0,09	-1,55
4. PMTB	3,54	9,55	3,29	-11,67	-4,40
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor	7,09	6,11	-0,44	-76,33	-70,63
7. Impor	17,14	24,41	-13,60	-78,26	-82,55
8. Net Ekspor Antar Daerah	-	-	-	-	-
Total PDRB	5,56	6,31	5,60	-9,33	-2,47

Keterangan:

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Dilihat dari pertumbuhan riilnya, atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), kinerja pembangunan di bidang ekonomi Provinsi Bali tahun 2021 menunjukkan hasil yang tidak menggemirakan. Selama periode tahun 2017-2019, pertumbuhan ekonomi Bali berada pada kisaran 5-6 persen. Namun di tahun 2020, perekonomian merosot tajam hingga kontraksi atau tumbuh negatif sedalam -9,31 persen dan di tahun 2021 kembali mengalami kontraksi hingga -2,47 persen. Selain itu, kontraksi tahunan Bali tahun 2021 ini merupakan pertumbuhan negatif ketiga setelah krisis pertama yang pernah terjadi di tahun 1998 lalu (tumbuh -4,04 persen).

Sementara itu, tingkat perubahan harga digambarkan melalui indeks implisit PDRB. Selama kurun waktu dari tahun 2017 hingga 2021, indeks implisit menunjukkan adanya kenaikan harga dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, indeks implisit PDRB sebesar 152,78 mengalami peningkatan dari indeks implisit PDRB pada tahun 2017 sebesar 146,99.

Tabel I.9
Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran
Provinsi Bali, 2017-2021

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
1. Konsumsi Rumah Tangga	134,08	139,66	143,04	147,00	149,41
2. Konsumsi LNPRT	147,72	148,28	151,90	152,74	154,58
3. Konsumsi Pemerintah	157,68	162,12	162,50	170,23	169,06
4. PMTB	135,75	140,84	141,95	144,84	150,77
5. Perubahan Inventori	272,08	280,42	257,05	216,53	190,03
6. Ekspor	154,64	162,80	164,23	175,87	168,27
7. Impor	156,02	157,41	158,52	152,98	157,31
8. Net Ekspor Antar Daerah	119,50	131,23	127,87	145,97	147,09
Total PDRB	146,99	151,64	154,85	151,78	152,78

Keterangan:

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

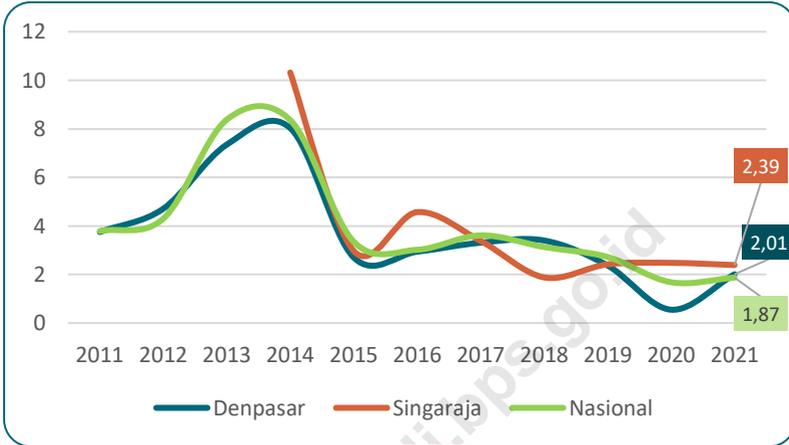
I.2 Perkembangan Inflasi dan IHK

Salah satu indikator ekonomi yang kiranya perlu diperhatikan dalam menjaga stabilitas moneter adalah inflasi. Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Jadi besarnya inflasi, hanya menggambarkan besarnya perubahan harga. Bisa saja harga sebenarnya masih tergolong rendah akan tetapi jika meningkat dari periode sebelumnya dikatakan inflasi, atau sebaliknya harga yang relatif tinggi dan hanya mengalami sedikit penurunan disebut sebagai deflasi. Tingkat harga dalam definisi inflasi, secara konseptual bisa dikatakan sebagai tingkat harga rata-rata tertimbang dari barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian. Dalam prakteknya, tingkat harga tersebut diukur dengan indeks harga, dalam hal ini indeks harga konsumen (IHK).

Laju inflasi dihitung berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK merupakan indeks yang diperoleh dengan menghimpun perubahan harga berbagai jenis barang dan jasa yang tercakup dalam paket komoditas yang menggambarkan pola konsumsi masyarakat di suatu wilayah dengan menggunakan diagram timbang nilai konsumsi pada tahun dasar yang dipantau. Selama kurun waktu satu dekade terakhir yaitu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 perhitungan inflasi menggunakan tiga tahun dasar yaitu tahun dasar 2007 untuk inflasi tahun 2011-2013; tahun dasar 2012 untuk inflasi tahun 2014 – 2019; serta tahun dasar 2018 untuk inflasi tahun 2020-2021. Sejak tahun 2014 pengukuran inflasi di Bali diperluas menjadi dua kota yakni Kota Denpasar dan Singaraja.

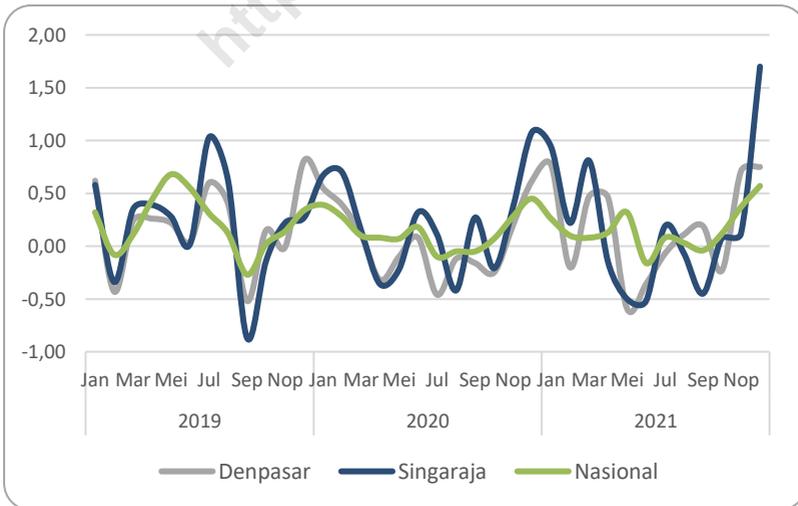
Grafik I.10

Inflasi Singaraja, Denpasar dan Nasional, 2011 – 2021



Grafik I.11

Inflasi Bulanan Singaraja, Denpasar dan Nasional, 2019 - 2021



Inflasi tingkat Nasional pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, yakni dari 1,68 persen menjadi 1,87 persen. Sejalan dengan kondisi tersebut, inflasi kota Denpasar di tahun ini tercatat 2,01 persen atau menurun 1,46 poin. Sebaliknya, inflasi kota Singaraja justru menurun pada periode waktu yang sama, yakni turun -0,09 poin atau menjadi 2,39 persen di tahun 2021.

Dilihat dari pergerakan inflasi per bulan, inflasi di Kota Singaraja, Kota Denpasar dan Nasional menunjukkan pola yang hampir mirip. Inflasi yang tinggi tercatat pada bulan Januari dan Juli. Sementara itu, kecenderungan penurunan harga/deflasi tercatat pada bulan Februari dan September. Siklus tahunan yang mempengaruhi tingginya nilai inflasi bulan Juli umumnya karena adanya tahun ajaran baru sekolah dan memasuki bulan puasa. Sementara jika dilihat antar tahunnya, sebagian besar inflasi bulanan

Selain itu, fluktuasi inflasi di Kota Singaraja terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Denpasar. Hal ini ditunjukkan dengan adanya *spike* yang tajam ke atas maupun curam ke bawah pada **Gambar I.11**. Artinya, terjadi tingkat inflasi yang lebih tinggi maupun deflasi yang lebih dalam di Kota Singaraja dibandingkan dengan Kota Denpasar.

Tabel I.10

Laju Inflasi Singaraja dan Denpasar Menurut Kelompok Pengeluaran,
2021

Kelompok / Group	Denpasar	Singaraja
1 Laju inflasi	2,01	2,39
2 Inflasi Menurut Kelompok		
2.1. Makanan, Minuman dan Tembakau	3,95	1,46
2.2. Pakaian dan Alas Kaki	-2,50	1,41
2.3. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	-0,02	0,17
2.4. Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	10,39	17,28
2.5. Kesehatan	0,78	2,42
2.6. Transportasi	2,23	2,61
2.7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,68	-0,55
2.8. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	-3,78	1,64
2.9. Pendidikan	-0,67	1,36
2.10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,72	0,00
2.11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	2,96	3,74

Dilihat dari kelompok komoditas konsumsi, pendorong pergerakan harga pada tahun 2021 antara dua kota di Bali tercatat sama. Di Kota Denpasar maupun Kota Singaraja tercatat mengalami inflasi tertinggi pada kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga dengan besaran inflasi masing-masing setinggi 10,39 persen dan 17,28 persen.

BAB II

Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata

II.1 Perdagangan Luar Negeri

Perdagangan luar negeri merupakan bentuk kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara-negara lain, berupa jual beli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan bagi suatu negara. Secara umum perdagangan luar negeri dapat dibedakan menjadi dua yaitu ekspor dan impor. Ekspor adalah penjualan barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara ke negara lainnya. Sementara impor adalah arus kebalikan dari ekspor, yaitu barang dan jasa dari luar suatu negara.

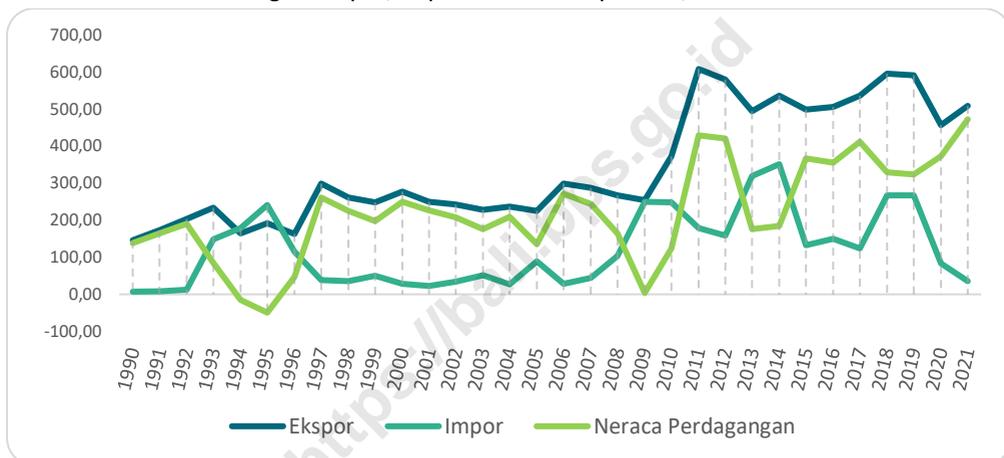
Sampai saat ini BPS masih menggunakan konsep F.o.B (*free on board*) untuk menilai besarnya ekspor barang dari satu wilayah. Konsep ini menegaskan bahwa besarnya ekspor dihitung di pelabuhan muat. Harga barang dihitung sampai di atas kapal negara pengekspor meliputi harga barang, pajak ekspor, biaya pengangkutan sampai ke batas negara, biaya asuransi, komisi, biaya pembuatan dokumen, biaya kontainer, biaya pengepakan dan biaya pemuatan barang ke kapal/pesawat udara atau alat transportasi lainnya. Keseluruhan ekspor barang dari Provinsi Bali merupakan komoditi ekspor non migas. Karena seperti diketahui bahwa Provinsi Bali tidak memiliki sumber minyak dan gas bumi.

Sementara untuk impor barang adalah memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Konsep perhitungan impor yang digunakan BPS adalah c.i.f (*cost insurance and freight*), yaitu penyerahan barang impor di pelabuhan tujuan. Pengertiannya, harga

barang sampai di pelabuhan negara pengimpor, meliputi biaya pengangkutan dari batas negara pengeksport ke batas negara pengimpor, biaya bongkar barang dan biaya asuransi pengirim.

Grafik II.1

Perkembangan Ekspor, Impor dan Net Ekspor Bali, 1990 – 2021



Dilihat dari tren jangka panjang, ekspor dan impor di Provinsi Bali cenderung mengalami pergerakan yang meningkat semenjak tahun 1990. Khusus periode 2009 sampai dengan 2011, daya ekspor Bali meningkat tajam bahkan sampai ratusan persen sehingga turut memberikan net perdagangan yang cukup besar kala itu. Sementara itu pergerakan 2019-2020 sempat menunjukkan nilai ekspor dan impor yang menurun drastis, akibat pembatasan mobilitas besar-besaran saat badai pandemi Covid-19 baru terjadi. Pada kondisi terakhir yakni 2020-2021, daya ekspor kembali menguat hingga 11,39 persen. Meningkatnya ekspor setahun terakhir

ternyata tidak diikuti dari sisi impor yang tercatat menurun -57,19 persen. Dengan demikian, net perdagangan terhitung surplus di periode 2021 ini. Bahkan keuntungan perdagangan Bali tahun 2021 yang sebesar 472,45 juta US\$ tercatat paling tinggi sepanjang periode 1990 hingga saat ini.

Tabel II.1
Ekspor Bali Menurut Negara Tujuan, 2020 - 2021

No.	Negara Tujuan	Jan - Des 2020		Jan - Des 2021 *)		Perubahan (%)
		Nilai (US\$)	%	Nilai (US\$)	%	
1	Amerika Serikat	143 947 042	31,56	185 055 536	36,40	28,56
2	Australia	38 925 605	8,53	46 233 632	9,09	18,77
3	Tiongkok	27 105 380	5,94	35 339 913	6,95	30,38
4	Jepang	31 685 082	6,95	25 770 903	5,07	-18,67
5	Perancis	20 175 593	4,42	18 460 542	3,63	-8,50
6	Taiwan	22 935 481	5,03	18 165 366	3,57	-20,80
7	Jerman	13 931 269	3,05	17 783 343	3,50	27,65
8	Belanda	14 043 696	3,08	17 608 990	3,46	25,39
9	Inggris	14 755 410	3,23	16 444 645	3,23	11,45
10	Singapura	19 735 555	4,33	13 699 757	2,69	-30,58
11	Lainnya	108 932 841	23,88	113 799 060	22,39	4,47
Total		456 172 955	100.00	508 361 687	100.00	11,44

Keterangan:

*) Angka Sementara

Kumulatif ekspor barang asal Provinsi Bali pada periode Januari–Desember 2021 mencapai US\$ 508.361.687, atau mengalami peningkatan 11,44 persen dibandingkan dengan keadaan pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai US\$ 456.172.955. Menurut pangsa pasar, ekspor barang asal Provinsi Bali pada tahun 2021, sebagian besar dikirim ke Amerika Serikat, Australia dan Tiongkok dengan proporsi masing–masing 36,40 persen, 9,09 persen dan 6,95 persen.

Tabel II.2
Ekspor Bali Menurut Komoditas Utama, 2021

	Kelompok Komoditas Commodity Group	Volume Volume (kg)	Nilai Value (US\$)	Pangsa Export Segment (%)
1.	Ikan, krustasea, dan moluska	21 651 954	136 572 269	26,87
2.	Logam mulia dan perhiasan/permata	248 107	62 631 536	12,32
3.	Pakaian dan aksesorinya (bukan rajutan)	1 903 797	59 367 858	11,68
4.	Kayu dan barang dari Kayu	8 698 676	37 647 858	7,41
5.	Pakaian dan aksesorinya (rajutan)	734 338	29 412 358	5,79
6.	Perabotan, lampu, dan alat penerangan	7 473 282	29 084 035	5,72
7.	Kertas, karton, dan barang daripadanya	699 045	24 629 177	4,84
8.	Barang anyaman	3 049 866	16 317 401	3,21
9.	Barang dari kulit samak	343 942	10 177 037	2,00
10.	Barang tekstil jadi lainnya	480 619	9 421 471	1,85
11.	Komoditas Lainnya	20 431 863	93 101 367	18,31
	Jumlah / Total :	65 715 488	508 361 687	100,00

Seperempat lebih ekspor Bali tahun 2021 adalah komoditas ikan, krustasea, dan moluska. Proporsi komoditas ini tercatat meningkat 0,23 poin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang ketika itu mencapai 26,64 persen. Kelompok komoditas lain yang memberikan kontribusi besar terhadap ekspor Bali pada tahun 2021 antara lain logam mulia dan perhiasan/permata serta pakaian dan aksesorinya (bukan rajutan) yang masing-masing kontribusinya mencapai 12,32 persen dan 11,68 persen.

Tabel II.3
Impor Bali Menurut Negara Asal, 2020 – 2021

No.	Negara Asal	Jan - Des 2020		Jan - Des 2021 *)		Perubahan (%)
		Nilai (US\$)	%	Nilai (US\$)	%	
1	Tiongkok	15 240 444	18,17	9 615 244	26,77	-36,91
2	Amerika Serikat	19 220 877	22,91	9 373 436	26,10	-51,23
3	Australia	6 453 312	7,69	4 220 861	11,75	-34,59
4	Jerman	3 259 311	3,89	3 868 165	10,77	18,68
5	Singapura	7 624 803	9,09	2 576 029	7,17	-66,22
6	Taiwan	3 586 312	4,28	1 563 683	4,35	-56,40
7	Thailand	2 214 619	2,64	1 474 007	4,10	-33,44
8	Italia	1 528 422	1,82	755 139	2,10	-50,59
9	Korea Selatan	1 945 969	2,32	738 904	2,06	-62,03
10	Hongkong	14 510 347	17,30	606 979	1,69	-95,82
11	Lainnya	8 304 417	9,90	1 121 179	3,12	-86,50
Total		83 888 833	100.00	35 913 626	100.00	-57,19

Secara kumulatif, impor barang Provinsi Bali periode Januari–Desember 2021 mencapai US\$ 35.913.626. Angka ini mengalami penurunan hingga -57,19 persen dari nilai impor Tahun 2020 yang tercatat US\$ 83.888.833. Menurut pangsa pasar, impor barang Provinsi Bali (Januari–Desember 2021) sebagian besar berasal dari Tiongkok, Amerika Serikat, dan Australia dengan persentase masing–masing sebesar 26,77 persen, 26,10 persen dan 11,75 persen.

Tabel II.4
Impor Bali Menurut Komoditas Impor, 2021

Kelompok Komoditas		Volume (kg)	Nilai (US\$)	Pangsa (%)
1.	Mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya	265 641	10 299 214	28,68
2.	Mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya	150 823	5 433 492	15,13
3.	Logam mulia dan perhiasan/permata	19 655	5 281 657	14,71
4.	Barang dari kulit samak	269 174	3 999 349	11,14
5.	Jam dan arloji serta bagiannya	135 633	2 155 339	6,00
6.	Instrumen optic, fotografi, sinematografi, dan medis	25 599	1 494 197	4,16
7.	Kain rajutan	66 329	1 435 117	4,00
8.	Berbagai barang logam tidak mulia	47 977	765 201	2,13
9.	Karet dan barang dari karet	34 721	688 701	1,92
10.	Barang dari besi dan baja	13 521	684 766	1,91
11.	Lainnya	241 514	3 676 593	10,24
Jumlah / Total :		1 270 587	35 913 626	100,00

Dilihat dari jenis komoditas, tiga besar pangsa impor Bali 2021 adalah komoditas mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya (28,68 persen); mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (15,13 persen); serta logam mulia dan perhiasan/permata (9,81 persen). Sementara itu, *share* impor di luar sepuluh besar komoditas utama tercatat sebesar 10,24 persen.

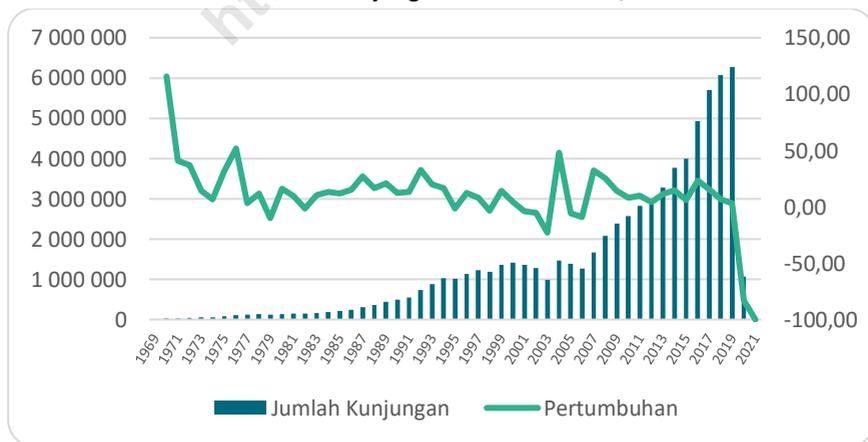
II.2 Perkembangan Pariwisata

Pariwisata menjadi penggerak utama ekonomi Bali sejak awal milenium. Pariwisata tidak hanya mampu meningkatkan skala ekonomi Bali namun juga memperluas sumber pertumbuhan Bali menjadi lebih heterogen dibandingkan dengan ketika ekonomi Bali hanya digerakkan oleh sektor pertanian. Pariwisata merupakan kekuatan ekonomi yang punya potensi besar di masa yang akan datang. Sektor ini akan memiliki jangkauan lebih luas terutama didukung oleh semakin cepatnya mobilisasi manusia, serta semakin beragam dan semakin murah biaya transportasi. Namun di satu sisi, sifat pariwisata juga cenderung “labil” akan pengaruh eksternal. Pengaruh keamanan seperti kegiatan terorisme serta bencana alam erupsi Gunung Agung pada triwulan IV 2019 sekiranya berdampak cukup parah terhadap sektor pariwisata Bali. Apalagi pada tahun 2020-2021 yang mencatatkan peristiwa pandemi Covid-19 yang mengisyaratkan protokol *physical distancing* dalam pencegahannya, membuat sektor pariwisata menjadi semakin terpuruk. Perlu usaha ekstra keras dari seluruh pihak untuk memulihkan pariwisata agar bergairah lagi.

Catatan kurang nyaman dan tergolong pada tingkatan “terpuruk” ditunjukkan indikator-indikator kepariwisataan Bali di tahun 2021. Pengetatan mobilitas penduduk dalam rangka memutus rantai penularan pandemi semakin membawa pariwisata tahun 2021 menuju titik terbawahnya. Apalagi kondisi pengurangan mobilitas besar-besaran berlaku secara global, nasional maupun internal Provinsi Bali. Pada tahun 2021, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Bali tercatat mencapai 51 kunjungan. Catatan tersebut merupakan capaian kunjungan terendah selama periode lima dekade terakhir, dengan besaran pertumbuhan *year on year* yang hampir menyentuh -100,00 persen. Penurunan jumlah wisatawan terakhir sebelum pandemi ini terjadi tercatat di tahun 2006 yang kala itu terpengaruh dampak pascabom Bali II.

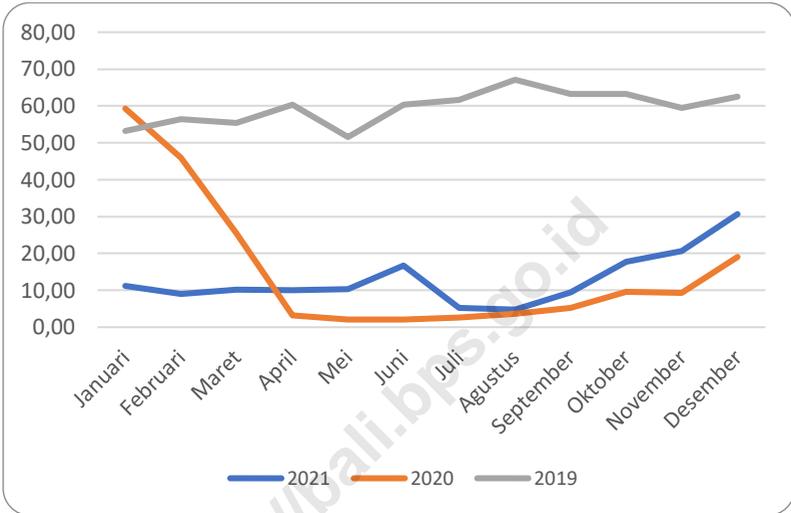
Grafik II.2

Jumlah dan Pertumbuhan Kunjungan Wisman ke Bali, 1969 - 2021



Grafik II.3

Perkembangan TPK Hotel Bintang Menurut Bulan, 2019-2021



Selain jumlah kedatangan wisman, indikator lain yang juga mencerminkan kondisi pariwisata adalah tingkat penghunian kamar (TPK) hotel. Indikator ini merupakan rasio jumlah kamar yang terjual dibagi dengan jumlah kamar keseluruhan di sebuah hotel. Secara umum, pergerakan nilai TPK hotel berbintang tahun 2021 terlihat lebih tinggi dibanding tahun 2020. Jarak melebar lebih tinggi dimulai dari bulan April 2021 dibanding April 2020. Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi April 2020 yang mulai merasakan dampak pertama kali pandemi Covid-19. Pada periode Juni 2021 ke Juli 2021, nilai TPK sempat mengalami penurunan dan kembali menguat sampai akhir Desember 2021 yang secara fenomena tahunan merupakan waktu dari *high season* wisatawan berkunjung ke Bali.

Grafik II.4

Perkembangan Rata-rata Lama Menginap Hotel Bintang Menurut Bulan, 2019 – 2021



Berbeda dengan kondisi TPK, tren rata-rata lama menginap (RLM) di hotel berbintang pada tahun 2021 cenderung lebih rendah dibanding dengan setahun sebelumnya. Tercatat nilai RLM di kedelapan bulan tahun 2021 (februari, maret, april, mei, juni, september, oktober, dan desember) lebih rendah dibanding nilai RLM bulanan tahun 2020. Jika dilihat dari setahun terakhir (januari-desember 2021), nilai RLM menunjukkan tren penurunan, dengan catatan nilai terendah di bulan September 2021 yang kala itu tercatat sebesar 1,83 hari.

BAB III

Pembangunan Sosial dan Pembangunan Manusia

III.1 Perkembangan Kondisi Kemiskinan

BPS mengidentifikasi masalah kemiskinan muncul karena ketidakmampuan orang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian maupun perumahan. Namun nyatanya permasalahan kemiskinan kini lebih kompleks yaitu menyangkut pada kebutuhan sosial bermasyarakat, serta pada masalah informasi bahkan standar hidup yang memadai. Permasalahan kemiskinan yang dulunya dinilai hanya bersifat searah (sebab-akibat) kini dipandang sebagai permasalahan yang bersifat resiprokal (saling mempengaruhi), sehingga dalam ungkapan yang lebih spesifik kemiskinan adalah salah satu *excess* dari beragam *excess* lain yang muncul akibat siklus perekonomian dan kemajuan sosial¹.

Sebagai permasalahan yang multi-dimensional, solusi untuk masalah kemiskinan seyogyanya juga bersifat multi-dimensional. Pemerintah menjadi pilar utama bangunan sosial-ekonomi yang mampu memayungi masyarakat dari bahaya kemiskinan. Artinya solusi yang dilakukan pemerintah hendaknya mampu meng-*counter* setiap *excess* yang ditimbulkan oleh kemiskinan di samping secara paralel mengurangi angka kemiskinan itu sendiri.

¹ CK. Prahalad. The Bottom of Pyramid

Pandemi Covid-19 yang telah melanda seluruh dunia tak terkecuali Indonesia berimbas pada meningkatnya jumlah penduduk miskin, begitupula dengan Bali ketika pandemi Covid-19 menyerang sektor utama perekonomian, hotel yang tutup, restoran yang bangkrut dan tempat wisata yang sepi membuat Bali kehilangan gairah perekonomian. Imbas dari semua ini adalah banyaknya tenaga kerja yang diberhentikan dan tidak bisa dihindari bahwa kemungkinan jumlah penduduk miskin pun akan bertambah selama masa pandemi.

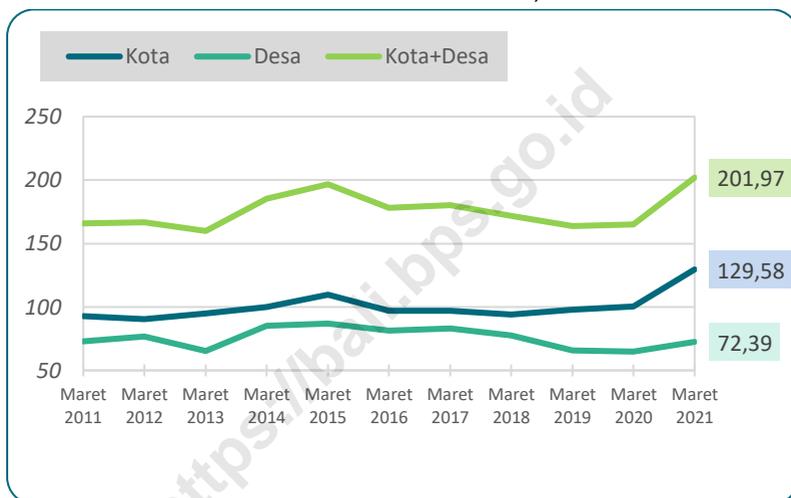
Jumlah penduduk miskin di Bali relatif terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, namun di tahun 2020 dan 2021 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sejalan dengan kondisi ekonomi regional yang melemah. Sebagian besar penduduk di Bali miskin masih mendiami wilayah perkotaan, meskipun jumlah ini tidak terlalu berbeda jauh dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di wilayah perdesaan.

Hingga Maret 2021, jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan mencapai 129,58 ribu jiwa sementara jumlah penduduk miskin di pedesaan sekitar 72,39 ribu jiwa. Kedua besaran tersebut mengalami peningkatan dibanding dengan tahun sebelumnya, dengan catatan peningkatan di wilayah perkotaan sebesar 29,09 persen dan di wilayah perdesaan sebesar 11,68 persen. Peningkatan yang lebih besar pada daerah perkotaan merupakan imbas dampak pandemi Covid-19 yang lebih parah kepada sektor-sektor jasa yang umumnya lebih banyak pada daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah perdesaan. Selain itu,

sektor usaha primer seperti sektor pertanian yang umumnya ada di perdesaan sekiranya mempunyai ketahanan lebih kuat dari pandemi Covid-19 dibandingkan dengan sektor-sektor usaha lainnya.

Grafik III.1

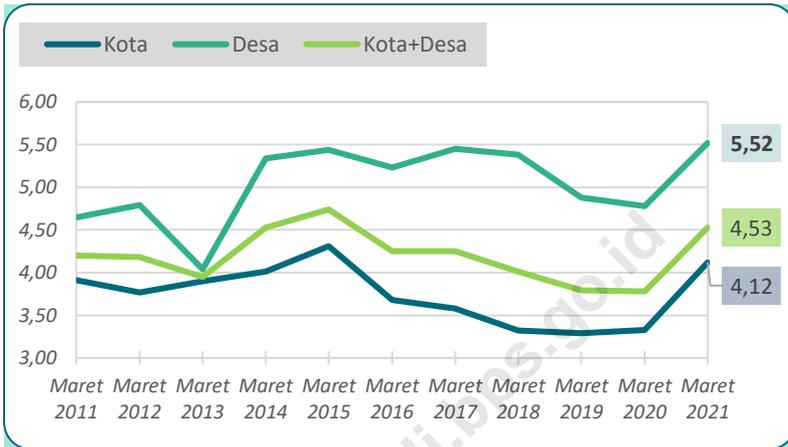
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali, 2011 – 2021



Di sisi lain peningkatan lebih tinggi persentase penduduk daerah perkotaan dibanding perdesaan mengakibatkan *gap* persentase kedua wilayah tersebut tercatat semakin mengecil. Peningkatan pada daerah perkotaan mencapai 0,79 poin sedangkan pada perdesaan mencapai 0,74 poin. Secara umum persentase penduduk miskin Bali meningkat dari 3,78 persen tahun 2020 menjadi 4,53 persen tahun 2021.

Grafik III.2

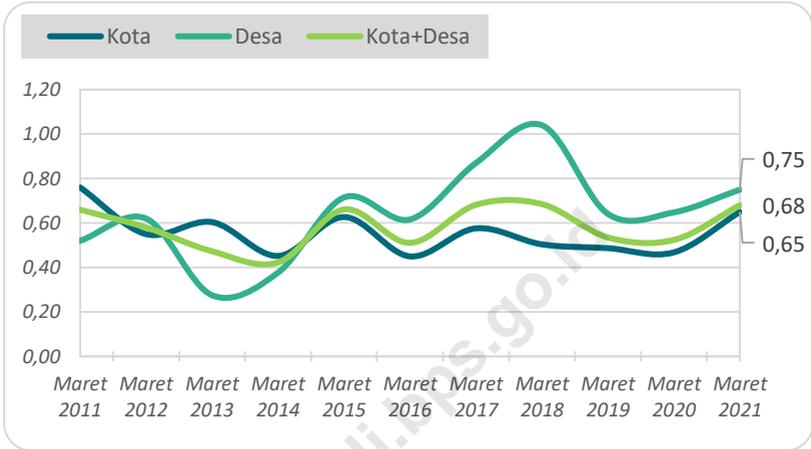
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali, 2011-2021



Peningkatan persentase penduduk miskin sejalan dengan meningkatnya indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Bali. Indeks kedalaman kemiskinan 2021 tercatat 0,68, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang tercatat 0,52. Sejak tahun 2011, indeks kedalaman di wilayah perkotaan tercatat lebih rendah dibandingkan dengan wilayah perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk miskin di wilayah perkotaan rata-rata memiliki tingkat konsumsi yang lebih mendekati garis kemiskinan dibandingkan dengan yang bermukim di perdesaan. Dengan demikian, peluang penduduk miskin di wilayah perkotaan untuk terlepas dari kemiskinan juga lebih besar dibandingkan dengan perdesaan. Namun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, *gap* kedua wilayah tersebut semakin mengecil yang terlihat dari peningkatan indeks keparahan perkotaan yang lebih tinggi dibanding wilayah perkotaan.

Grafik III.3

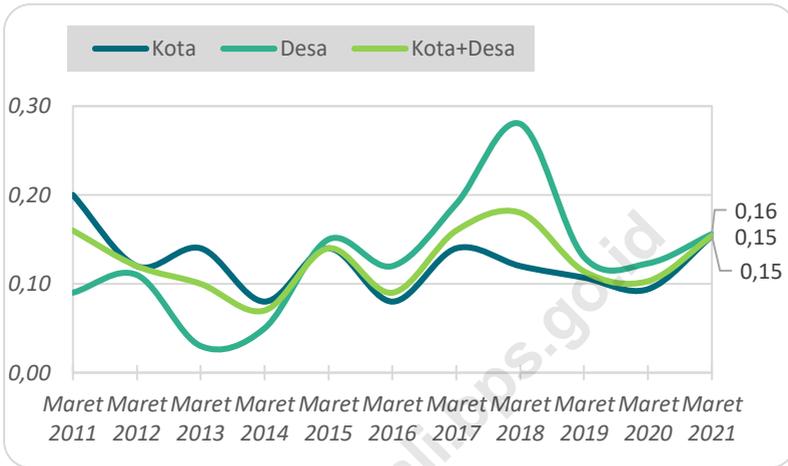
Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali, 2011-2021



Dari sisi kualitas kemiskinan lainnya, besaran indeks keparahan tahun 2021 juga menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indeks keparahan pada tahun 2021 tercatat 0,15 atau meningkat 0,05 poin dibanding tahun 2020. Dalam periode jangka panjang, tren tingkat keparahan juga menunjukkan pergerakan yang relatif menyerupai pergerakan indeks kedalaman kemiskinan. Lebih fluktuatifnya pergerakan indeks keparahan perdesaan dalam periode waktu jangka panjang dibandingkan dengan perkotaan sekiranya karena penciptaan sumber-sumber ekonomi yang tidak seragam di wilayah perdesaan. Sementara itu, penciptaan sumber-sumber lapangan kerja yang lebih merata di perkotaan mengakibatkan indeks keparahan kemiskinan di perkotaan mengalami pergerakan yang lebih stabil dibandingkan dengan perdesaan.

Grafik III.4

Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Bali, 2011-2021



III.2 Perkembangan Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan penduduk dihitung untuk mengetahui apakah pada dasarnya kemajuan perekonomian sudah dirasakan oleh semua lapisan masyarakat bukan hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat saja. Bali sebagai daerah tujuan wisatawan yang mengandalkan investasi luar untuk pembangunan pariwisatanya, yang secara dominan bertujuan untuk membangun infrastruktur penunjang dari kegiatan pariwisata itu sendiri.

Tidak heran karena tingginya investasi dari luar negeri banyak pihak yang meragukan apakah pada dasarnya investasi yang diberikan sebanding dengan apa yang masyarakat Bali dapatkan terutama dikaitkan dengan output yang dihasilkan oleh investasi itu. Timbul juga keraguan beberapa pihak, apakah investasi itu mampu mensejahterakan sebagian

besar penduduk, atau malah menambah lebar jurang kesenjangan pendapatan itu sendiri.

Hal yang umum dilakukan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat (kemiskinan relatif) suatu daerah adalah dengan pendekatan kriteria Bank Dunia dan Koefisien Gini (*Gini Ratio*). Adapun kriteria Bank Dunia yang umum dihitung yaitu melalui tingkat ketimpangan penduduk yang terpusat pada 40 persen penduduk berpendapatan rendah.

Kriteria ketimpangan pendapatan dapat didefinisikan sebagai berikut:

- ◆ **Ketimpangan Tinggi** (*high inequality*), bila 40 persen penduduk dalam kelompok berpendapatan terendah ini menerima kurang dari 12 persen jumlah pendapatan penduduk. Dapat dikatakan “pemerataan rendah/kurang”.
- ◆ **Ketimpangan Sedang** (*moderate inequality*), bila 40 persen penduduk dalam kelompok berpendapatan terendah ini menerima 12-17 persen dari jumlah pendapatan penduduk. Dapat dikatakan “pemerataan sedang”.
- ◆ **Ketimpangan Rendah** (*low inequality*), bila 40 persen penduduk dalam kelompok berpendapatan terendah ini menerima lebih dari 17 persen jumlah pendapatan penduduk. Dapat dikatakan “pemerataan tinggi/baik”.

Distribusi pendapatan penduduk merupakan suatu hal yang sebaiknya diperhatikan dalam melihat kinerja perekonomian daerah. Pertumbuhan yang tinggi hendaklah diikuti oleh pemerataan “kue ekonomi” agar tujuan menyejahterakan penduduk dapat tercapai. Salah satu ukuran (indikator) yang dapat mengukur tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat (kemiskinan relatif) adalah distribusi pendapatan dan *gini ratio*.

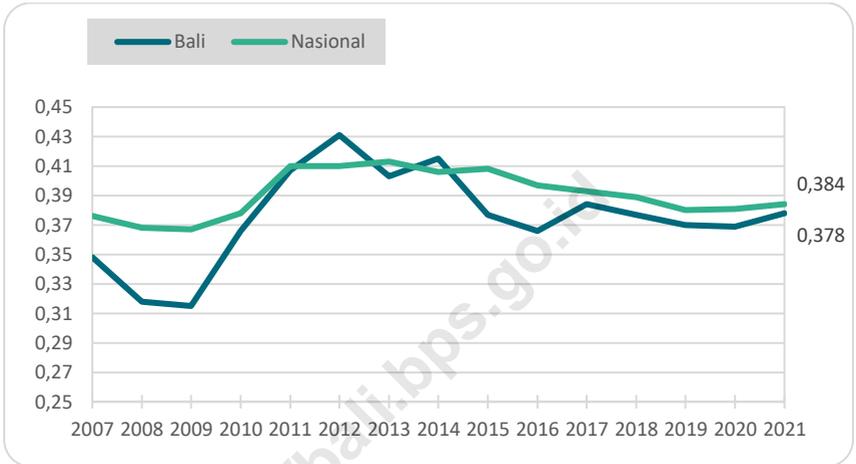
Menurut rasio Gini ketimpangan dalam pendapatan dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

1. **Ketimpangan rendah** jika angka Gini berkisar dari 0,1 hingga 0,2
2. **Ketimpangan sedang** jika rasio Gini berkisar diatas 0,2 hingga 0,5
3. **Ketimpangan tinggi** jika rasio Gini berada diatas 0,5

Sepanjang tahun 2007-2021 terjadi perubahan level pada tingkat ketimpangan di Bali dan Nasional. Dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir, tingkat ketimpangan Bali tercatat di bawah tingkat ketimpangan secara nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan yang ada di Bali lebih rendah dibandingkan sebagian besar wilayah lain yang ada di Indonesia. Di saat yang bersamaan indikator ini juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Bali dampaknya terhadap ekonomi secara keseluruhan jauh lebih merata dibandingkan dengan sebagian besar provinsi yang ada di Indonesia.

Grafik III.5

Koefisien Gini Bali dan Nasional, 2007 – 2021



Pada tahun 2021 koefisien Gini Bali mencapai angka 0,378. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 0,369. Sedangkan pada tingkat nasional, koefisien gini tercatat mencapai angka 0,384 atau lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 0,381. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perubahan indeks gini relatif **tidak berpengaruh** terhadap kondisi sosial. Akan tetapi apabila transisi perubahan Gini **berlangsung sangat cepat** dampak yang dihasilkan terhadap kondisi sosial di masyarakat akan jauh lebih besar.

Di Bali dalam beberapa tahun terakhir, distribusi ekonomi mayoritas dinikmati oleh kelompok atas mencapai hampir separuh dari total kue ekonomi. Pada tahun 2021, kelompok atas menikmati 45,31 persen kue ekonomi Bali. Sebaliknya kelompok terbawah hanya memperoleh kurang dari seperlima kue ekonomi Bali, yakni sebesar 17,85 persen.

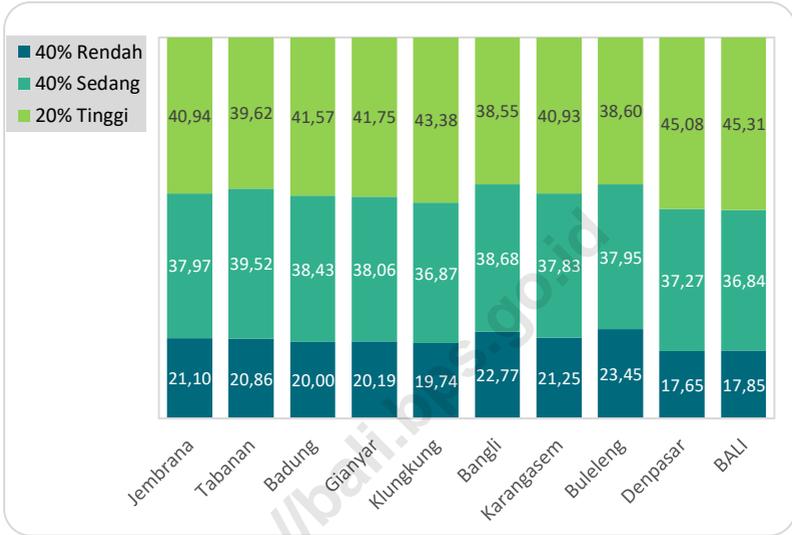
Grafik III.6
Distribusi Pendapatan di Bali, 2017 – 2021



Pada tingkatan kabupaten/kota, Kota Denpasar tergolong memiliki sebaran pendapatan yang masih berimbang antara satu kelompok pendapatan dengan kelompok lainnya. Meskipun demikian, bila dibandingkan dengan wilayah lainnya, kabupaten ini tergolong memiliki distribusi pendapatan yang paling timpang. Hal ini terjadi karena paling rendahnya distribusi ekonomi ke kelompok terbawah, akibat kuatnya tarikan pada kelompok pendapatan teratas.

Grafik III.7

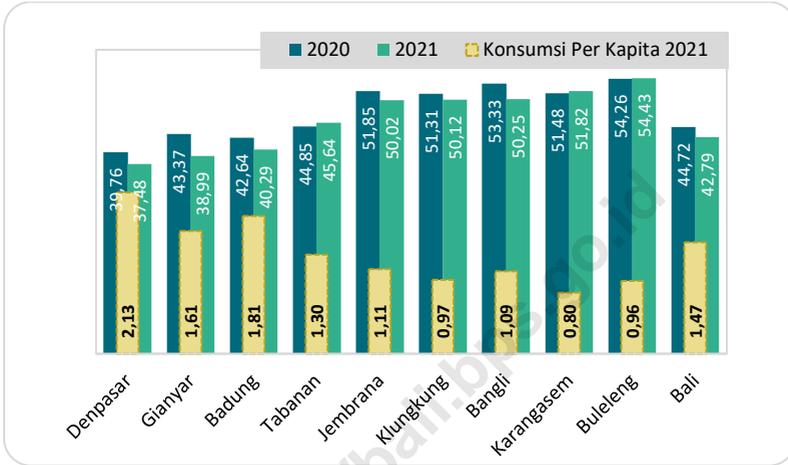
Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Bali, 2021



Sementara itu perubahan pada level konsumsi tidak terlalu berpengaruh terhadap perubahan pada level ketimpangan. Hal ini ditunjukkan oleh korelasi yang rendah pada kedua indikator. Peningkatan pada level konsumsi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan rasio gini. Tentunya hal ini sedikit banyak mengindikasikan bahwa perubahan pada ketimpangan lebih banyak terjadi pada kelompok yang tidak terlalu berpengaruh pada nilai tengah, yang dalam konteks ini adalah kelompok dengan pengeluaran tertinggi.

Grafik III.8

Distribusi Konsumsi Makanan Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2020 dan 2021 Beserta Konsumsi Per Kapitanya

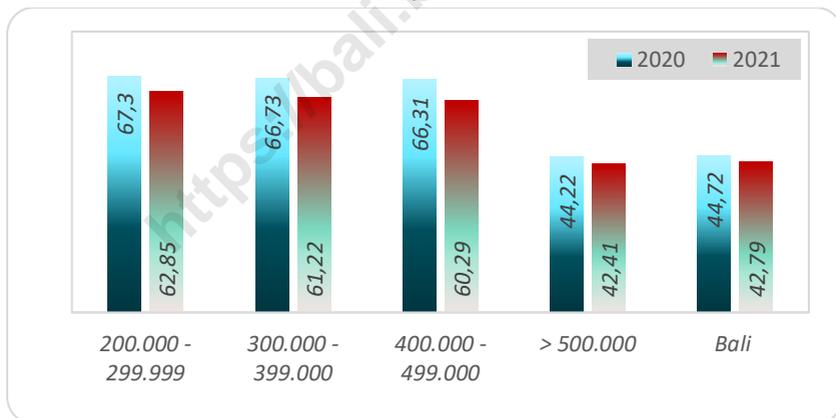


Secara umum hanya tiga kabupaten/kota yang mengalami peningkatan pada proporsi konsumsi makanan di tahun 2021 yaitu Kabupaten Tabanan, Karangasem dan Buleleng. Selebihnya mengalami penurunan dengan tiga penurunan terdalam tercatat pada Kabupaten Gianyar, Bangli, dan Badung.

Selama dua tahun terakhir, proporsi konsumsi non makanan masyarakat di beberapa kabupaten/kota tercatat lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan (mencapai kurang dari 50 persen yakni pada kisaran 40 persen terhadap total konsumsi). Ketiga wilayah dengan proporsi konsumsi non makanan tertinggi tercatat pada Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Badung.

Di sisi lain ada hal yang cukup menarik diamati terkait dengan konsumsi masyarakat Bali. Pada wilayah dengan tingkat pengeluaran tertinggi, rasio konsumsi makanan justru semakin rendah. Sebagai contoh wilayah Kota Denpasar yang konsumsi per kapitanya mencapai dua juta rupiah komposisi konsumsi makanan berada di bawah 40 persen. Kondisi ini cukup berbeda dengan Karangasem. Dengan konsumsi per kapita kurang dari setengah Denpasar, proporsi konsumsi makanannya mencapai lebih dari 50 persen.

Grafik III.9
Porsi Konsumsi Makanan Menurut Golongan Pengeluaran
Penduduk Bali, 2020 – 2021



Porsi konsumsi makanan pada golongan pengeluaran pada grafik III.9 menggambarkan bahwa penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita di bawah 500 ribu rupiah memiliki porsi konsumsi yang dominan terhadap makanan dibanding non makanan. Secara umum, proporsi penduduk Bali mengkonsumsi makanan pada tahun 2021 sebesar 42,79 persen menurun 1,93 poin dibandingkan tahun 2020.

III.3 Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan

Tenaga kerja memiliki peran strategis dalam sebuah pembangunan terutama peran dalam kegiatan produksi. Hanya saja dalam prosesnya, optimalisasi produktivitas tenaga kerja berbeda dibandingkan dengan optimalisasi faktor produksi atau sumber daya modal lainnya. Apabila peningkatan produktivitas sumber daya modal ditempuh melalui riset dan teknologi maka proses peningkatan pada sumber daya manusia harus melewati jalan panjang yaitu berupa peningkatan pada aspek-aspek kehidupan mereka yang ditempuh dengan perbaikan kualitas hidup terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan terutama dengan meningkatkan insentif dan memberikan jaminan/tanggung, permasalahan ketenagakerjaan masih terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Permasalahan ini tidak bersifat lokal atau hanya terjadi di Bali melainkan memiliki skala nasional. Beberapa di antaranya adalah *outsourcing*, pengupahan, kesehatan dan keselamatan kerja, pemutusan hubungan kerja, serta masalah tenaga kerja asing. Permasalahan *outsourcing* masih belum sepenuhnya terselesaikan. Hal ini terjadi karena meskipun aspek legalitas serta tata laksana *outsourcing* sudah diatur, implementasi pengelolaan yang baru belum sepenuhnya dilaksanakan.

Masalah pengupahan cukup rumit dalam ketenagakerjaan. Hal ini terjadi karena menurut beberapa kalangan upah merupakan insentif utama dengan peran yang jauh lebih penting dibandingkan dengan insentif lainnya untuk tenaga kerja di negara berkembang. Oleh karena

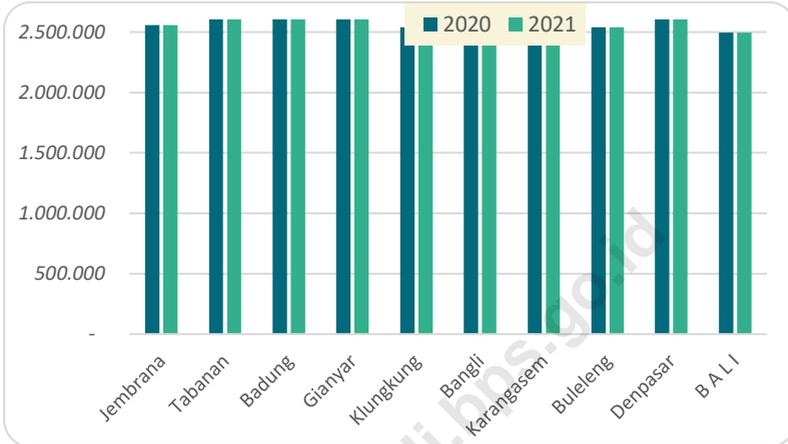
itu, keseimbangan antara tingkat upah yang layak bagi buruh maupun pengusaha sulit tercapai. Di sisi lain sistem pengupahan di Indonesia masih menggunakan upah untuk status lajang sehingga akan menjadi kurang ketika upah yang diberikan digunakan untuk menghidupi sebuah keluarga atau rumah tangga.

Sementara itu konsep upah minimum seringkali berbeda dalam implementasinya. Upah minimum hanya mampu diterapkan pada pekerja dengan status pekerja formal namun sangat sulit diterapkan dalam pekerja informal. Tingginya jumlah pencari kerja dibandingkan dengan lapangan kerja yang tersedia membuat sebagian besar pekerja mau menerima upah di bawah tingkat upah minimum yang ditetapkan. Selain itu minimnya jumlah lapangan kerja yang tersedia dibandingkan dengan jumlah pencari kerja seringkali juga berdampak pada standar upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja.

Upah minimum kabupaten/kota (UMK) tertinggi di Bali pada tahun 2021 tercatat di Kabupaten Badung yang mencapai 2,93 juta rupiah/bulan. Di sisi lain UMK terendah tercatat di Kabupaten Bangli yang tercatat 2,49 juta rupiah/bulan. Sementara itu Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali tercatat mencapai 2,49 juta rupiah/bulan. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 532/03-M/HK/2020, upah minimum antara tahun 2020 dan 2021 tidak mengalami perubahan. Sekiranya hal ini terjadi akibat masih terpuruknya kondisi perekonomian regional akibat pandemi Covid-19.

Grafik III.10

UMP Kabupaten/Kota (Rp.) dan Provinsi Bali Tahun 2020 dan 2021

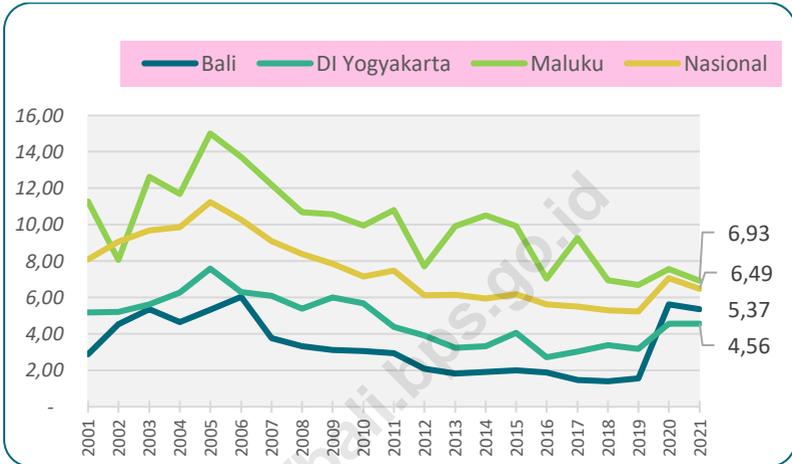


Selain pada penentuan upah minimum, perhatian tenaga kerja yang utama antara lain berkisar pada penurunan tingkat pengangguran dan peningkatan partisipasi angkatan kerja dalam perekonomian. Dalam teori ekonomi murni, pengangguran pada dasarnya bersifat sukarela (*voluntary unemployment*) artinya pengangguran terjadi karena tenaga kerja tidak mau bekerja pada sembarang tingkat upah tertentu, jika seseorang mau bekerja apa saja pada tingkat upah berapa saja maka pengangguran tidak akan terjadi.

Teori ekonomi juga meyakini bahwa pada dasarnya daerah memiliki tingkat pengangguran tinggi karena sedikitnya kesempatan kerja dan rendahnya penyerapan angkatan kerja. Untuk itu kiranya diperlukan apa yang disebut sebagai pengembangan spesialisasi sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja.

Grafik III.11

Tingkat Pengangguran Terbuka Bali, Nasional, dan Beberapa Provinsi, 2001-2021



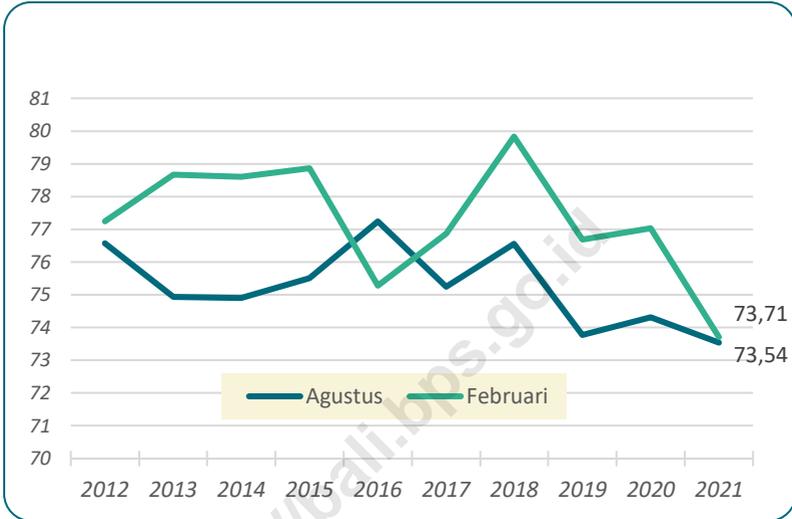
Tren pengangguran selama beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Wilayah dengan sumber ekonomi berbasis agraris dan jasa relatif memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah dibandingkan dengan yang berbasis industri. Pada tahun 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bali sebesar 5,37 persen atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 5,63 persen. Dengan kata lain dapat diinterpretasikan bahwa pada 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 6 orang merupakan pengangguran. Sesuai grafik III.11 selama beberapa periode tahun terakhir tren TPT nasional berada di atas TPT Bali dan TPT DI Yogyakarta.

TPT Bali tahun 2021 merupakan TPT tertinggi ke tiga selama sepuluh tahun terakhir. Tingginya besaran TPT Bali tahun 2021 secara tidak langsung merupakan efek dari pandemi Covid-19 yang telah melanda Bali sejak bulan Maret 2020. Pembatasan mobilitas dan pergerakan masyarakat serta penutupan bandara bahkan tempat-tempat wisata telah mempengaruhi luar biasa sektor jasa yang merupakan tumpuan utama perekonomian Bali. Melemahnya perekonomian regional membuat kemampuan penyerapan tenaga kerja Bali sekiranya jauh menurun, ditambah lagi banyaknya pekerja yang mengalami pemberhentian sementara tanpa adanya kejelasan status masa depan, serta pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi selama masa pandemi juga turut serta meningkatkan jumlah pengangguran di Bali.

Selain tingkat pengangguran terbuka, perhatian pada ketenagakerjaan juga dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) seperti grafik III.12. TPAK yang tinggi memberikan indikasi pengangguran yang lebih rendah. TPAK dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. TPAK pada tahun 2021 menurun menjadi 73,54 persen dari sebelumnya tercatat sebesar 74,32 persen. TPAK bulan Februari selama tiga tahun terakhir memiliki tren yang sama dengan TPAK bulan Agustus. Pada periode tahun 2019-2020, TPAK Februari dan Agustus sama-sama mengalami kenaikan. Sementara itu di periode 2020-2021 mengalami penurunan dengan penurunan di TPAK Februari sedalam -3,32 poin, sedangkan TPAK Agustus sedalam -0,78 poin.

Grafik III.12

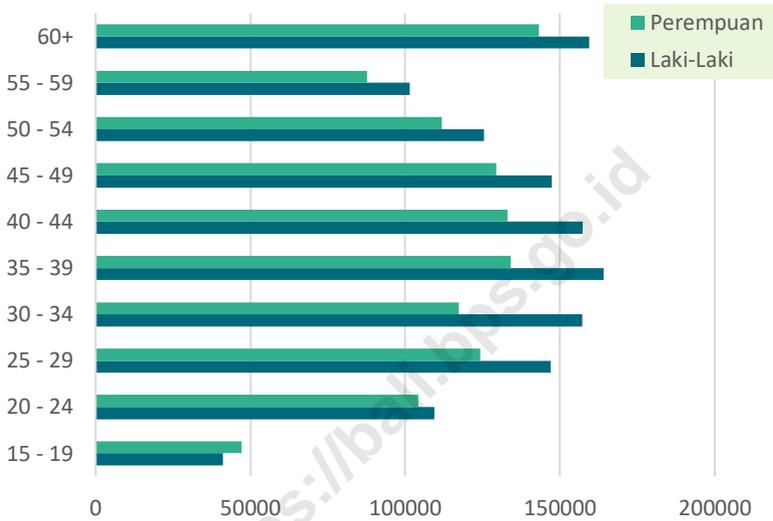
TPAK Bali Bulan Agustus dan Februari, 2012 – 2021



Dilihat dari usianya, sebagian besar tenaga kerja di Bali berada pada kelompok usia di atas 30 tahun. Meskipun demikian persentase angkatan kerja yang bekerja untuk kelompok usia sekolah (15-24 tahun) juga relatif masih cukup tinggi. Persentase di kelompok usia ini mencapai angka sekitar 12,37 persen. Selain itu persentase untuk kelompok usia di atas 60 tahun juga cukup tinggi yaitu sekitar 12,39 persen. Hal ini menunjukkan bahwa rasio ketergantungan murni Bali (memperhitungkan penduduk yang bekerja di semua kelompok umur) akan lebih rendah dibandingkan dengan rasio ketergantungan secara keseluruhan.

Grafik III.13

Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin di Bali, 2021



Dari 2,44 juta angkatan kerja yang bekerja pada tahun 2021, hampir dari sepertiganya bekerja di sektor jasa terutama sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (30,53 persen). Sektor usaha kerja dengan jumlah pekerja tertinggi selanjutnya adalah sektor pertanian dan sektor industri dengan besaran proporsi angkatan kerja masing-masing sebesar 21,90 persen dan 16,14 persen. Selebihnya, kisaran di luar ketiga sektor usaha tersebut tercatat pada kisaran di bawah 10 persen.

Grafik III.14

Proporsi Angkatan Kerja Menurut Sektor di Bali, 2021



III.4 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia

Sebagai salah satu indikator pokok untuk menentukan tingkat keberhasilan pembangunan, IPM seringkali digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat ditinjau dari tiga sudut pandang kelayakan hidup yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Ketiga komponen ini diberikan bobot yang setara akan tetapi berbeda dalam konfigurasi sendiri.

Konsep IPM ini telah lama diperkenalkan oleh Amartya Sen dan Mahbub al Haq, dua ekonom dari Asia Selatan. Dalam perjalanannya hanya Sen yang kemudian menjadi nobelis ekonomi untuk karya-karyanya di bidang pemerataan pembangunan. Terlebih dari indeks awal yang

diterbitkan oleh UNDP, Badan Pusat Statistik melakukan pematokan ulang (refiksasi) untuk standarisasi IPM agar sekiranya bisa digunakan untuk mewakili kondisi di Indonesia. Kalibrasi ulang ini juga diperlukan untuk menjaga keterbandingan wilayah-wilayah di Indonesia.

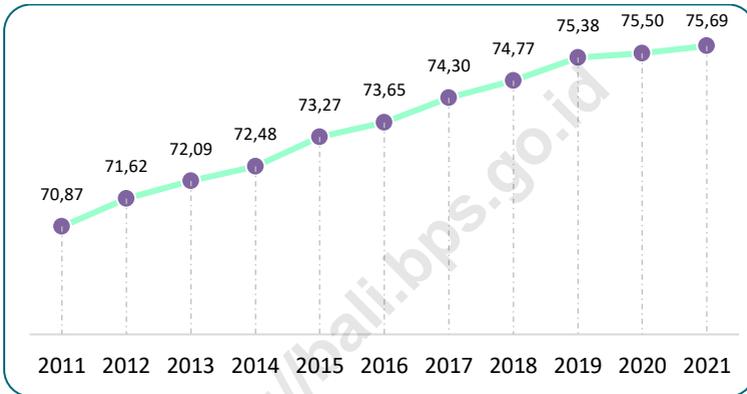
Pada *Human Development Report* (HDR) tahun 1990 UNDP memperkenalkan tiga indikator pembentuk indeks pembangunan manusia yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dari ketiga dimensi tersebut, diturunkan empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM, yaitu angka harapan hidup saat lahir (AHH), angka melek huruf (AMH) dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Nilai dari ketiga indikator itu kemudian digabungkan atau diagregasi dengan menggunakan rata-rata hitung atau aritmetis.

Penyempurnaan pertama untuk metode ini dilakukan pada tahun 1991. Pada revisi yang pertama ini, komponen pendidikan tidak hanya menggunakan AMH melainkan kombinasi antara AMH dengan rata-rata lama sekolah (RLS). Metode agregasi tidak mengalami perubahan pada revisi ini.

Pada penyempurnaan kedua di tahun 1995, komponen RLS dihilangkan dari penghitungan. Komponen ini kemudian digantikan oleh Angka Partisipasi Kasar (APK) yang dihitung dari setiap jenjang pendidikan. Sementara itu pada revisi ketiga di tahun 2010 tidak hanya mengubah metode agregasi dengan metode geometrik, akan tetapi menandai kembalinya RLS sebagai indikator acuan penghitungan. Pada tahun ini komponen AMH dihilangkan dan digantikan dengan Harapan

Lama Sekolah (HLS) karena indikator AMH dianggap sudah stagnan dan kurang mencerminkan keragaman.

Grafik III.15
Perkembangan IPM Bali 2011 - 2021



IPM Bali pada tahun 2011-2021 menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Pada tahun 2021, IPM Bali tercatat sebesar 75,69. Sementara pada tahun 2011, IPM Bali waktu itu tercatat sebesar 70,87. Dengan kata lain, peningkatan IPM selama tahun 2011 hingga tahun 2021 mencapai 4,82 poin. Secara rata-rata, peningkatan IPM setiap tahun selama periode tahun 2010-2021 mencapai 0,70 persen.

Pertumbuhan IPM pada periode tahun 2011 hingga tahun 2021 tidak mengubah status capaian IPM Bali. Semenjak tahun 2010 hingga saat ini, status IPM masih tergolong “tinggi”. Selain itu capaian IPM Bali tahun 2021 ini sudah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) periode 2018-2023 khususnya tahun 2021 yang memasang target akhir tahun sebesar 75,61.

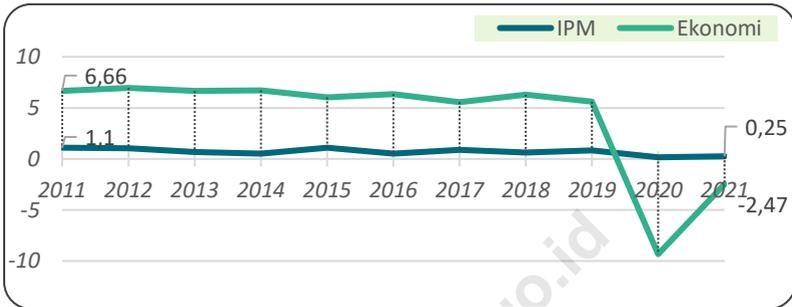
Tabel III. 1
Indikator Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali, 2011-2021

Bali	Tahun										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
IPM	70,87	71,62	72,09	72,48	73,27	73,65	74,3	74,77	75,38	75,50	75,69
Peningkatan	0,77	0,75	0,47	0,39	0,79	0,38	0,65	0,47	0,61	0,12	0,19
Pertumbuhan	1,1	1,06	0,66	0,54	1,08	0,53	0,88	0,63	0,82	0,16	0,25
Status IPM	Tinggi										

Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, maka pola yang terjadi nampak sejalan. Pada sisi pertumbuhan penciptaan nilai tambah ekonomi maupun sisi pertumbuhan IPM cenderung sama-sama mengalami perlambatan. Walaupun demikian, hal ini nampaknya menunjukkan bahwa ada kemungkinan apa yang dihasilkan oleh suatu proses ekonomi, memiliki korelasi terhadap dampak yang dihasilkan sehubungan dengan kenaikan kualitas hidup masyarakat. Sekiranya, pertumbuhan ekonomi di Bali terasa cukup merata sehingga juga mampu diikuti oleh peningkatan kapabilitas penduduk dalam proses pencapaiannya.

Grafik III.16

Pertumbuhan IPM dan Ekonomi Bali, 2011 – 2020



Jika dibandingkan menurut kabupaten/kota di Bali (Tabel III.2), maka hanya IPM Kota Denpasar dan Kabupaten Badung yang tercatat pada capaian IPM golongan “sangat tinggi”. Capaian IPM Kota Denpasar mengalami peningkatan dari “tinggi” menjadi “sangat tinggi” pada tahun 2012. IPM tertinggi kedua setelah Kota Denpasar ditempati oleh Kabupaten Badung. IPM Kabupaten Badung pada tahun 2017 mengalami pergeseran status menjadi sangat tinggi dengan capaian IPM sebesar 80,54. Periode tahun 2021, capaian kedua wilayah tersebut masih menempati posisi dua besar tertinggi dibandingkan wilayah lain di Bali dengan besaran masing-masing setinggi 84,03 (Denpasar) dan 81,83 (Badung).

Sementara itu, capaian IPM terendah menurut kabupaten/kota di Bali tercatat pada Kabupaten Bangli dan Karangasem. Kedua capaian IPM kabupaten tersebut masih tergolong “sedang”. Semenjak tahun 2010 hingga saat ini, status capaian IPM keduanya tidak mengalami perubahan. Namun jika ditinjau dari sisi nilainya, keduanya sudah

mendekati nilai kategori “tinggi” yang minimal mencapai besaran 70,00. Pada tahun 2021, capaian IPM Kabupaten Karangasem tercatat 67,36, sedangkan Kabupaten Bangli tercatat 69,37.

Dengan mempertimbangkan pada pertumbuhan rata-rata selama tiga tahun terakhir, diperkirakan pada tahun 2027 ada satu kabupaten yang akan mengalami perubahan pada status IPM-nya. Jika pola pertumbuhannya tetap stabil, Kabupaten Bangli yang kemungkinan akan mengalami perubahan status dari sedang menjadi tinggi. Di lain pihak IPM Bali sendiri diperkirakan tidak mengalami perubahan status dalam beberapa tahun ke depan.

Tabel III.2

Perkembangan IPM Bali Menurut Kabupaten/Kota, 2019 - 2021

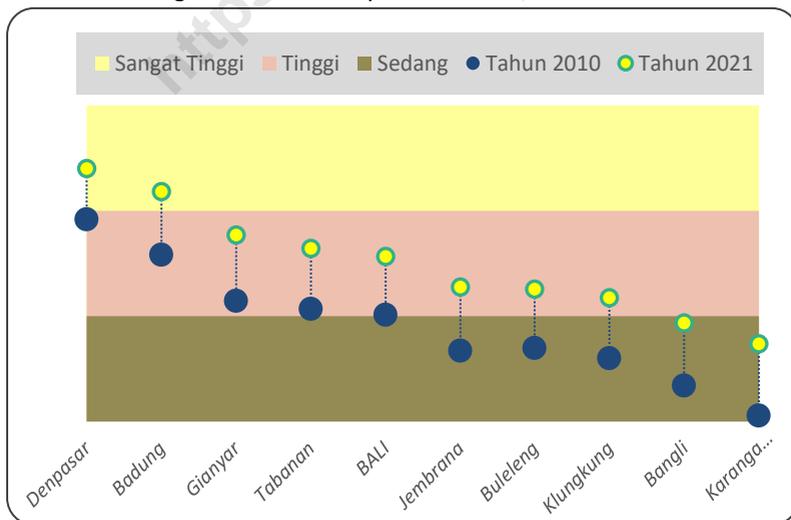
Kabupaten/Kota	IPM			Pertumbuhan (%)			Status IPM Tahun 2020
	2019	2020	2021	2018-2019	2019-2020	2020-2021	
Jembrana	72,35	72,36	72,75	0,98	0,01	0,54	Tinggi
Tabanan	76,16	76,17	76,45	0,94	0,01	0,37	Tinggi
Badung	81,59	81,60	81,83	0,89	0,01	0,28	Sangat Tinggi
Gianyar	77,14	77,36	77,70	0,56	0,29	0,44	Tinggi
Klungkung	71,71	71,73	71,75	1,14	0,03	0,03	Tinggi
Bangli	69,35	69,36	69,37	0,57	0,01	0,01	Sedang
Karangasem	67,34	67,35	67,36	1,28	0,01	0,01	Sedang
Buleleng	72,30	72,55	72,56	0,84	0,35	0,01	Tinggi
Kota Denpasar	83,68	83,93	84,03	0,46	0,30	0,12	Sangat Tinggi
Provinsi Bali	75,38	75,50	75,69	0,82	0,16	0,25	Tinggi

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, empat dari sembilan kabupaten/kota mengalami percepatan pertumbuhan IPM. Kabupaten Jembrana tercatat sebagai wilayah yang mengalami percepatan pertumbuhan tertinggi yakni naik 0,53 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pertumbuhan IPM Kabupaten Klungkung, Bangli, Karangasem, dan Buleleng tercatat tidak mengalami perubahan dan tergolong kecil dari sisi besaran nilai, yakni di bawah 0,05 persen.

Berdasarkan grafik III.17, Kabupaten Karangasem yang memiliki nilai IPM terkecil tahun 2021 ternyata menjadi wilayah dengan capaian rentang IPM tertinggi selama sebelas tahun terakhir. IPM Karangasem periode 2010-2021 mampu naik 6,78 poin atau tercatat tumbuh 11,19 persen.

Grafik III.17

Pergerakan Status Capaian IPM Bali, 2010 – 2021



Sebagai indikator yang sekiranya mampu mengukur pencapaian pembangunan manusia, IPM memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Selain itu patokan nilai dasar juga tidak mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jika tidak terjadi perubahan destruktif yang signifikan seperti halnya bencana alam, atau peperangan, capaian IPM relatif tidak akan mengalami penurunan.

Tabel III.3
Pertumbuhan IPM dan Komponennya Bali, 2019 - 2021

Komponen	Satuan	2019	2020	2021
Umur harapan hidup saat lahir (UHH)	Tahun	71,99	72,13	72,24
Harapan lama sekolah (HLS)	Tahun	13,27	13,33	13,40
Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	8,84	8,95	9,06
Pengeluaran per kapita disesuaikan	Rp Juta	14,15	13,93	13,82
IPM		75,38	75,50	75,69

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 UHH Provinsi Bali tercatat mencapai 72,24 tahun atau meningkat 0,11 tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan UHH pada tahun 2021 tercatat lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan tahun 2020 yang mencapai 0,14 tahun.

Kabupaten Badung tercatat memiliki UHH tertinggi dibandingkan wilayah lain di Provinsi Bali. UHH Badung pada tahun 2021 tercatat mencapai 75,18 tahun atau meningkat 0,08 tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. UHH tertinggi setelah Kabupaten Badung adalah Kota Denpasar, yang pada tahun 2021 ini UHH-nya mencapai 74,93 tahun. Sementara itu wilayah dengan UHH terendah pada tahun 2021 tercatat pada Kabupaten Karangasem dengan capaian sebesar 70,56 tahun.

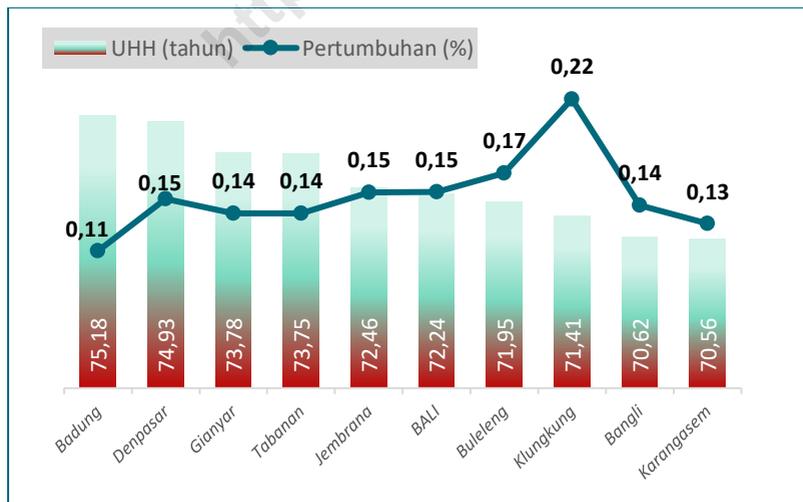
Tabel III.4
Umur Harapan Hidup (UHH) Bali, 2011-2021

Kabupaten/ Kota	Umur Harapan Hidup (Tahun)										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jembrana	70,92	71,09	71,26	71,39	71,43	71,57	71,70	71,91	72,21	72,35	72,46
Tabanan	72,18	72,35	72,52	72,64	72,74	72,89	73,03	73,23	73,53	73,65	73,75
Badung	73,91	74,05	74,19	74,30	74,31	74,42	74,53	74,71	74,99	75,10	75,18
Gianyar	72,43	72,57	72,71	72,78	72,84	72,95	73,06	73,26	73,56	73,68	73,78
Klungkung	69,45	69,66	69,84	69,91	70,11	70,28	70,45	70,70	71,06	71,25	71,41
Bangli	68,98	69,18	69,36	69,44	69,54	69,69	69,83	70,05	70,37	70,52	70,62
Karangasem	68,76	68,96	69,12	69,18	69,48	69,66	69,85	70,05	70,35	70,47	70,56
Buleleng	70,23	70,41	70,58	70,71	70,81	70,97	71,14	71,36	71,68	71,83	71,95
Kota Denpasar	73,34	73,44	73,56	73,71	73,91	74,04	74,17	74,38	74,68	74,82	74,93
BALI	70,78	70,94	71,11	71,20	71,35	71,41	71,46	71,68	71,99	72,13	72,24

Umur Harapan Hidup Kabupaten Klungkung meskipun menempati urutan terendah ke tiga pada tahun 2021, namun memiliki pertumbuhan yang paling tinggi dibandingkan kabupaten lainnya. Pertumbuhan UHH Klungkung tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 tercatat sebesar 0,22 persen. Pertumbuhan UHH tertinggi selanjutnya tercatat di Kabupaten Buleleng yang tercatat tumbuh 0,17 persen. Selanjutnya, Kota Denpasar dan Kabupaten Jembrana menjadi tertinggi ketiga dengan besaran pertumbuhan yang sama yakni sebesar 0,15 persen. Sementara itu, Kabupaten Badung menjadi wilayah dengan pertumbuhan UHH terendah yang pada tahun 2021 ini hanya mampu tumbuh 0,11 persen.

Grafik III.18

Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Bali dan Pertumbuhannya, 2021

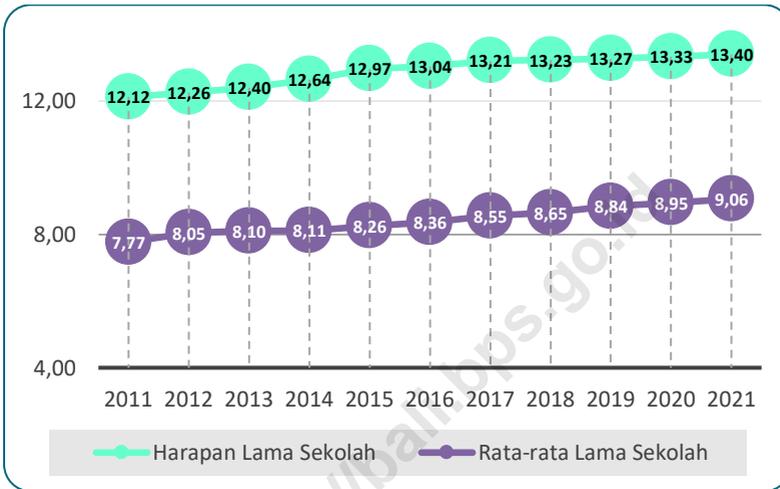


Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Secara teori apabila melihat kondisi terkini maka rata-rata lama sekolah akan lebih mencerminkan kondisi atau kualitas pendidikan penduduk di suatu wilayah. Pada tahun 2021, Harapan Lama Sekolah di Provinsi Bali tercatat 13,40 tahun atau meningkat sebesar 0,07 tahun dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat 13,33 tahun. Kenaikan HLS di tahun ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 0,06 tahun. Selain itu, HLS Bali tahun 2021 yang sebesar 13,40 tahun memiliki arti bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,40 tahun atau setara dengan Diploma II.

Komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang juga mencerminkan dimensi pendidikan, mendefinisikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Pada tahun 2021, RLS Provinsi Bali tercatat sebesar 9,06 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Bali yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,06 tahun atau menamatkan kelas tiga SMP. Komponen RLS Bali Tahun 2021 meningkat 0,11 tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat selama 8,95 tahun. Kenaikan ini juga tercatat sama dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang juga meningkat 0,11 tahun.

Grafik III.19

Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Bali, 2011 – 2021



Pada Tabel III.5 mengenai HLS menurut kabupaten/kota di Bali, mencatatkan Kota Denpasar sebagai daerah dengan HLS tertinggi pada tahun 2021. Capaian HLS Kota Denpasar tercatat 14,09 tahun atau meningkat 0,09 tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian HLS Denpasar pada tahun 2021 hanya berada sedikit di atas Badung yang tercatat 13,99 tahun dan Gianyar yang tercatat 13,97 tahun. Di sisi lain, Bangli tercatat sebagai kabupaten dengan capaian HLS terendah di tahun 2021 dengan catatan sebesar 12,35 tahun.

Secara umum kenaikan HLS pada periode 2020–2021 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan periode 2019–2020. Lima dari sembilan kabupaten/kota yakni Tabanan, Badung, Klungkung, Bangli,

dan Karangasem tercatat mengalami besaran kenaikan yang sama dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, tiga kenaikan tertinggi pada periode 2020-2021 tercatat pada Kabupaten Jembrana yang naik 0,27 tahun, Kota Denpasar yang naik 0,09 tahun, dan Kabupaten Gianyar yang naik 0,08 tahun. Di sisi lainnya, Kabupaten Badung yang hanya mampu naik 0,01 tahun memiliki kemungkinan yang semakin kecil untuk menyamai Kota Denpasar di posisi pertama.

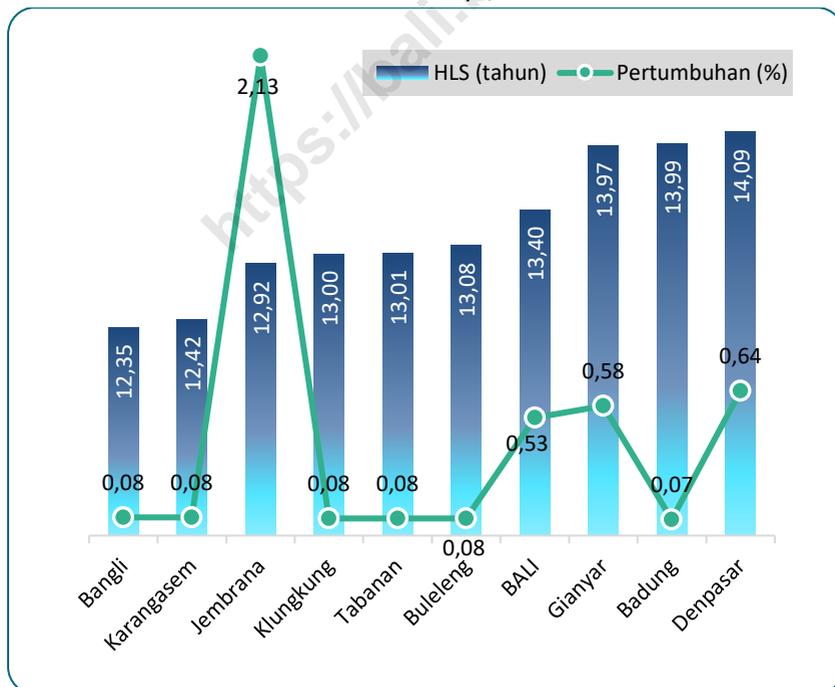
Tabel III.5
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Bali Menurut Kabupaten/kota,
2019-2021

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)			Kenaikan (Tahun)		
	2019	2020	2021	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Jembrana	12,63	12,65	12,92	0,02	0,02	0,27
Tabanan	12,99	13,00	13,01	0,03	0,01	0,01
Badung	13,97	13,98	13,99	0,02	0,01	0,01
Gianyar	13,80	13,89	13,97	0,09	0,09	0,08
Klungkung	12,98	12,99	13,00	0,03	0,01	0,01
Bangli	12,33	12,34	12,35	0,02	0,01	0,01
Karangasem	12,40	12,41	12,42	0,01	0,01	0,01
Buleleng	12,91	13,07	13,08	0,02	0,16	0,01
Kota Denpasar	13,99	14,00	14,09	0,01	0,01	0,09
Provinsi Bali	13,27	13,33	13,40	0,04	0,06	0,07

Pada tahun 2021, pertumbuhan HLS kabupaten/kota di Bali secara rata-rata tumbuh 0,42 persen. Besaran tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang secara rata-rata tumbuh 0,28 persen. Jika ditinjau selama setahun terakhir (2020-2021), pertumbuhan HLS tertinggi tercatat pada Kabupaten Jembrana yang tercatat mampu tumbuh hingga 2,13 persen. Dua pertumbuhan tertinggi selanjutnya tercatat pada Kota Denpasar dengan pertumbuhan 0,64 persen dan Kabupaten Gianyar dengan pertumbuhan 0,58 persen.

Grafik III.20

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Bali dan Pertumbuhannya, 2021



Komponen dimensi pendidikan lain yaitu rata-rata lama sekolah (RLS) juga menunjukkan kenaikan pada tahun 2021 untuk semua kabupaten/kota. Pada Tabel III.6 memperlihatkan bahwa RLS Kota Denpasar tercatat yang paling tinggi pada tahun 2021, dengan besaran mencapai 11,48 tahun. Setelah Denpasar adalah kabupaten Badung dan Gianyar yang masing-masing catatan RLS-nya sebesar 10,62 tahun dan 9,29 tahun. Sementara itu, Kabupaten Karangasem tercatat sebagai wilayah dengan RLS terendah yakni sebesar 6,33 tahun. Berdasarkan capaian RLS tahun 2021, hanya Denpasar, Badung, dan Tabanan yang tercatat memiliki RLS setara dengan pendidikan di atas SMP.

Dilihat dari kenaikan 2020-2021, empat dari sembilan kabupaten/kota tercatat mengalami kenaikan yang lebih tinggi dibanding kenaikan 2019-2020. Tiga kenaikan RLS tertinggi periode 2020-2021 tercatat pada Kabupaten Tabanan yang naik 0,26 tahun, Kabupaten Gianyar yang naik 0,25 tahun, dan Kabupaten Badung yang naik 0,23 tahun.

Selama tiga tahun terakhir (2019 s.d. 2021), rata-rata kenaikan tahunan RLS seluruh kabupaten/kota tercatat sebesar 0,12 tahun. Kabupaten Badung tercatat sebagai daerah yang memiliki rata-rata kenaikan tertinggi yakni 0,19 tahun. Sebaliknya, Kabupaten Bangli yang rata-rata kenaikan tahunan RLS sebesar 0,02 tahun tercatat sebagai yang terendah.

Tabel III.6
Rata-rata Lama Sekolah/*Mean Years of Schooling* (MYS) Bali
Menurut Kabupaten/Kota, 2019-2021

Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)			Kenaikan (Tahun)		
	2019	2020	2021	2018- 2019	2019- 2020	2020- 2021
Jembrana	8,22	8,23	8,35	0,27	0,01	0,12
Tabanan	8,87	8,88	9,14	0,23	0,01	0,26
Badung	10,38	10,39	10,62	0,32	0,01	0,23
Gianyar	8,94	9,04	9,29	0,02	0,10	0,25
Klungkung	8,12	8,13	8,14	0,37	0,01	0,01
Bangli	7,16	7,17	7,18	0,03	0,01	0,01
Karangasem	6,31	6,32	6,33	0,34	0,01	0,01
Buleleng	7,08	7,24	7,25	0,04	0,16	0,01
Kota Denpasar	11,23	11,47	11,48	0,07	0,24	0,01
Provinsi Bali	8,84	8,95	9,06	0,19	0,11	0,11

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP). PPP sendiri menggunakan tahun dasar 2012 sebagai harga konstan dan Kota Jakarta Selatan sebagai acuan sehingga PPP antar tahun bisa diketerbandingkan tanpa menghiraukan faktor perkembangan harga. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita penduduk Provinsi Bali mencapai Rp 13,82 juta rupiah per tahun atau menurun 109 ribu rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

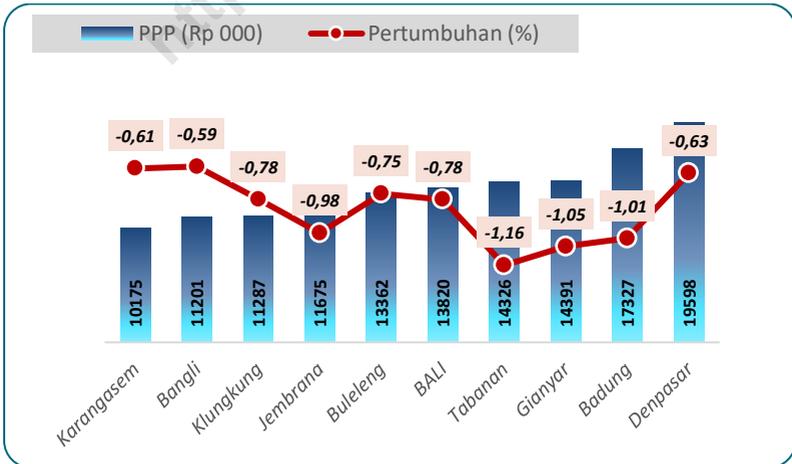
Grafik III. 21

Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Provinsi Bali,
2011 - 2021 (Rp 000)



Grafik III.22

Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Per Kabupaten/Kota dan
Pertumbuhannya, 2021



Kabupaten/kota yang tercatat memiliki pengeluaran per kapita tertinggi pada tahun 2021 adalah Kota Denpasar, dengan besaran mencapai 19,60 juta rupiah. Pengeluaran per kapita Kabupaten Badung menjadi pengeluaran per kapita tertinggi kedua setelah Kota Denpasar dengan besaran mencapai 17,33 juta rupiah. Kabupaten yang tercatat dengan pengeluaran per kapita terendah adalah Kabupaten Karangasem dengan capaian sebesar 10,17 juta rupiah.

Tabel III.7
Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan Menurut Kabupaten/kota di Bali, 2019-2021

Kabupaten/Kota	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rp)			Kenaikan (Ribu Rp)		
	2019	2020	2021	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Jembrana	11.902	11.790	11.675	236	-112	-115
Tabanan	14.608	14.494	14.326	363	-114	-168
Badung	17.628	17.503	17.327	303	-125	-176
Gianyar	14.623	14.544	14.391	247	-79	-153
Klungkung	11.484	11.376	11.287	166	-108	-89
Bangli	11.369	11.268	11.201	209	-101	-67
Karangasem	10.302	10.237	10.175	252	-65	-62
Buleleng	13.780	13.463	13.362	545	-317	-101
Kota Denpasar	19.992	19.723	19.598	294	-269	-125
Provinsi Bali	14.146	13.929	13.820	260	-217	-109

Secara umum, pengeluaran per kapita seluruh kabupaten/kota selama setahun terakhir tercatat mengalami penurunan. Penurunan pengeluaran per kapita terendah tercatat di Kabupaten Badung yang mencapai 176 ribu rupiah. Setelah Badung, Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Gianyar menjadi daerah dengan penurunan PPP terendah selanjutnya. Pada periode 2020-2021, PPP Kabupaten Tabanan turun 168 ribu rupiah sedangkan PPP Kabupaten Gianyar turun 153 ribu rupiah. Sementara itu, penurunan PPP terdangkal tercatat di Kabupaten Karangasem yang tercatat turun sedalam 62 ribu rupiah.

Grafik III.23

IPM Beberapa Provinsi di Wilayah Jabalnusra, 2021



Pada tahun 2021, posisi IPM Bali secara nasional tercatat menempati peringkat kelima. IPM Bali tercatat lebih rendah dari IPM DKI Jakarta, DIY, Kalimantan Timur dan Kepulauan Riau. Di regional JABALNUSRA tercatat dua provinsi masih berada pada kategori “sedang”. Di sisi lain kesenjangan IPM di regional Bali Nusra masih cukup terasa. Capaian IPM NTT misalnya hanya berada pada kisaran 65,28 sementara IPM NTB berada pada 68,65 pada tahun 2021. Kesenjangan tersebut lebih terlihat jika dibandingkan antar wilayah barat dan wilayah timur Indonesia. Perlambatan pertumbuhan wilayah timur dibandingkan wilayah barat mempengaruhi pergerakan IPM pada masa yang akan datang. Jika kondisi ini tetap terjadi selama lima tahun ke depan, angka IPM tersebut cenderung masih akan menempati posisi yang sama dengan tahun ini.

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BALI**
Jl. Raya Puputan, No. 1 Renon, Denpasar
Telp.: (0361) 238159, Fax: (0361) 238162
Email: bps5100@bps.go.id
Homepage: <http://bali.bps.go.id>

ISSN 2477-7587



9 772477 75800 1